



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
KECAMATAN WAIBLAMA
TAHUN 2025**

**KECAMATAN WAIBLAMA
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kecamatan Waiblama Tahun 2025 ini merupakan perwujudan pertanggung jawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2025. Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Waiblama mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 – 2029.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali dan alat transparansi serta pertanggungjawaban kepada Bupati dan masyarakat. Peningkatan kinerja di lingkungan Kecamatan Waiblama yang diukur berdasarkan penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Camat Waiblama Tahun 2025.

Secara umum capaian kinerja sasaran belum sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Oleh karena itu untuk mencapai target sangat ditentukan oleh anggaran yang dimiliki dan komitmen aparatur dalam kaitan dengan peran kecamatan dalam memberikan pelayanan pada urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Laporan Kinerja Kecamatan Waiblama Tahun 2025 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran perangkat kecamatan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Kecamatan Waiblama secara keseluruhan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan Pemerintah Kabupaten Sikka.

Tanarawa, 26 Januari 2026

Camat Waiblama,



Fransiskus Ismael, SE
Pembina Tingkat I

NIP. 19760915 200212 1 008

DAFTAR ISI

Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Bagan	v
Ikhtisar Eksekutif	vii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi	1
1.2. Aspek Strategis Organisasi	7
1.3. Struktur Organisasi Kecamatan Waiblama	8
1.4. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi	8
1.5. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja	12
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	14
Rencana Strategis	14
Visi	14
Misi	15
2.1. Dokumen Perencanaan Tahun 2024-2026	15
2.2. Dokumen Perencanaan Tahun 2025-2029	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	40
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	40
3.2. Realisasi Anggaran	68
BAB IV PENUTUP	76
4.1. Kesimpulan	76
4.2. Saran	77

LAMPIRAN :

1. Lampiran 1 Rencana Kerja Tahunan Perubahan Tahun 2025;
2. Lampiran 2 Pohon Kinerja Perubahan Kecamatan Tahun 2025;
3. Lampiran 3 Cascading Perubahan Tahun 2025;
4. Lampiran 4 Perjanjian Kinerja Kerja Perubahan Tahun 2025
5. Lampiran 5 Pengukuran Capaian Kinerja Utama Tahun 2025
6. Lampiran 6 Rencana Aksi Atas Perubahan Perjanjian Kinerja Kerja Tahun 2025
7. Lampiran 7 Realisasi Rencana Aksi Atas Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
8. Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2026

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Program dan Kegiatan Tahun 2025	10
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026	19
Tabel 2.2	Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025	24
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Camat Waiblama	26
Tabel 2.4	Lampiran Rincian Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	27
Tabel 2.5.	Keselarasn Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Renstra PD dengan Keputusan Kepala PD tentang Indikator Kinerja Utama PD Tahun 2024-2026, Rencana Kinerja Tahunan Perubahan PD Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahunan Perubahan PD Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan PD Tahun 2025.....	28
Tabel 2.6	Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029	30
Tabel 2.7	Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025	35
Tabel 2.8	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Camat Waiblama	37
Tabel 2.9	Lampiran Rincian Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	38
Tabel 2.10	Keselarasn Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Renstra PD dengan Keputusan Kepala PD tentang Indikator Kinerja Utama PD Tahun 2025-2029, Rencana Kinerja Tahunan Perubahan PD Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahunan Perubahan PD Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan PD Tahun 2025	39
Tabel 3.1	Analisis Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025..	41
Tabel 3.2	Analisis Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Realisasi Tahun 2024 dan 2023.	42
Tabel 3.3	Analisis Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Akhir Renstra Tahun 2024-2026	44
Tabel 3.4	Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional	45
Tabel 3.5	Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan	47
Tabel 3.5.1	Analisis Pencapaian Indikator Sasaran Tersedianya Sarana dan Parasarana	49

Tabel 3.5.2	Penjelasan tentang Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 1 Tersedianya Sarana dan Prasarana	49
Tabel 3.5.3	Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 2 Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Publik	51
Tabel 3.5.4	Penjelasan Tentang Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 2 Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Publik	52
Tabel 3.5.5	Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 3 Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	53
Tabel 3.5.6	Penjelasan Tentang Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 3 Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	53
Tabel 3.5.7	Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 4 Adanya Inovasi Pelayanan Publik	54
Tabel 3.5.8	Penjelasan Tentang Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 4 Adanya Inovasi Pelayanan Publik	55
Tabel 3.6	Efisiensi Anggaran Tahun 2025	56
Tabel 3.7	Analisis Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.	58
Tabel 3.8	Analisis Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Realisasi Tahun 2024	58
Tabel 3.9	Analisis Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Akhir Renstra Tahun 2025-2029	59
Tabel 3.10	Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional	60
Tabel 3.11	Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	63
Tabel.3.12	Efisiensi Anggaran Tahun 2025	66
Tabel. 3.13	Sarana dan Prasarana Kantor Tahun 2025	67
Tabel. 3.14	Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2025	69
Tabel 3.15	Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025	70

DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Struktur Orgnisasi Tahun 2025	8
---------	-------------------------------------	---

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Pimpinan Perangkat Daerah Wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Bupati.

Laporan Kinerja Tahun 2025 ini merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi Kecamatan Waiblama yang berisi gambaran kinerja yang memuat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Kecamatan Waiblama dalam Renstra 2024 – 2026 menetapkan, 1 (satu) Tujuan , 4 (empat) sasaran strategis, yang di ukur dengan 5 (lima) Indikator Kinerja dan Renstra 2025-2029 menetapkan 1 (satu) tujuan, , 2 (dua) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pencapaian Kinerja

Secara umum berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap target sebagaimana telah diperjanjikan pada tahun 2025 dan realisasi capaian kinerja tahun 2024, menunjukkan bahwa kinerja yang di capai dinyatakan berhasil mencapai 100% atau mendapat kategori sangat memuaskan. meskipun beberapa indikator sasaran masih memerlukan kerja keras, perhatian dan komitmen, keterlibatan seluruh komponen masyarakat yang berkepentingan secara integral dan sinergi dalam memenuhi program/kegiatan Kecamatan Waiblama pada tahun 2025.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator sasaran dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Realisasi Capaian Indikator Sasaran Tahun 2025
Renstra 2024-2026

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI
	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	76,61	76,61

1.		Tersedianya Sarana dan Prasarana	Persentase Sarana dan Prasarana	Indeks	74,43	74,43
2.		Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Publik	Kemudahan akses cepatakurat dan akuntabel	%	0,42	0,42
3.		Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	Tersedianya SOP	%	2,00	2,00
4.		Adanya Inovasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik	%	0,8	0,8

Dari tabel diatas bahwa :

- Pencapaian Indikator Sasaran 1 : **Tersedianya Sarana dan Prasarana**, dengan indikator kinerja indeks sarana dan prasarana telah mencapai target.
- Pencapaian Indikator Sasaran 2 : **Tersedianya sistem Informasi Pelayanan Publik**, dengan indikator kinerja kemudahan akses Cepat, Akurat dan Akuntabel telah mencapai target.
- Pencapaian Indikator Sasaran 3 : **Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan**, dengan indikator kinerja tersedianya SOP telah mencapai target
- Pencapaian Indikator Sasaran 4 : **Adanya Inovasi Pelayanan Publik**, dengan indikator kinerja inovasi pelayanan publik telah mencapai target.
- Pencapaian Indikator Kinerja **Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)** mencapai target.

Realisasi Capaian Indikator Sasaran Tahun 2025
Renstra 2025-2029

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI
	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik yang responsif terhadap Kebutuhan		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	2,60	0,75
1.		Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks	76,61	76,61
2.		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	78,80	Belum ada penilaian

Dari tabel diatas bahwa

- Pencapaian Indikator Sasaran 1 : **Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan**, dengan indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan telah mencapai target.
- Pencapaian Indikator Sasaran 2 : **Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah**, dengan indikator kinerja Angka Nilai SAKIP Perangkat Daerah belum ada penilaian.
- Pencapaian indikator Kinerja **Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (IPP)** Kecamatan Waiblama belum memenuhi target dan masih dalam kategori "F ", yaitu **Prioritas Pembinaan**.

Kendala Khusus:

1. Tingkat koordinasi lintas sektor di kecamatan untuk melaksanakan lomba inovasi masih belum maksimal.
2. Aparatur khusus pelayanan publik Aparatur di kecamatan tidak memiliki pendidikan, ketrampilan, dan pengalaman khusus tentang pelayanan publik.
3. Minimnya Sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik, seperti kualitas dan kuatitas sarana pendukung kurang memadai, peralatan komputer yang kurang,

- kondisi gedung kantor yang kurang memadai dan jaringan internet yang kurang baik
4. Penanganan Pengaduan Lemah: Minimnya respons terhadap keluhan, saran, dan masukan masyarakat.
 5. Kurang reponsivitas : Aparatur sering kali kurang tanggap dalam menyelesaikan pelayanan sesuai standar waktu (SOP).
 6. Kurangnya Informasi : Informasi mengenai persyaratan dan prosedur pelayanan tidak tersebar luas kepada masyarakat.
 7. Belum ada Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..
 8. Penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi) belum ada
 9. Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik. belum ada
 10. Proses penyusunan dan perubahan Standar Pelayanan (SP) belum melibatkan unsur masyarakat

Kendala Umum

1. Kondisi topografi yang sulit;
2. Minimnya kesadaran aparat desa untuk mengirim data ke kecamatan
3. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan mekanisme pengaduan dan konsultasi.
4. Kendala teknis infrastruktur: akses jalan desa dan kabupaten yang belum memadai, jaringan internet buruk, dan sering terjadi pemadaman listrik
5. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap perubahan

11. Pendanaan :

Sumber dana yang tersedia pada tahun 2025 untuk menyelenggarakan 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan berasal dari APBD II yang termuat dalam DPPA Kecamatan Waiblama Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.1.549.398.925,00,- dengan realisasi anggaran Tahun 2025 sebesar Rp.1.430.444.520,00 atau sebesar 92,32 %

12. Strategi :

Kedepan untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa yang akan datang perlu ada langkah kebijakan teknis/operasional untuk memantapkan kebijakan agar tujuan dan sasaran Kecamatan Waiblama dapat

terlaksana/dicapai sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah kebijakan teknis/operasional yang diupayakan untuk peningkatan pencapaian kinerja, yaitu:

1. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi disesuaikan dengan kondisi di desa;
2. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan secara berkala;
3. Meningkatkan profesionalitas aparatur baik melalui pelatihan/ bimbingan teknis terhadap manajemen pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana;
5. Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
6. Peningkatan jaringan internet dan listrik;
7. Peningkatan anggaran dan fasilitas sarana parasarana pendukung kegiatan;
8. Peningkatan koordinasi lintas sektor dan OPD terkait;
9. Peningkatan akses jalan desa yang ada

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka, dan penjabarannya di atur melalui Peraturan Bupati Sikka Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, maka dapat dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kecamatan, sebagai berikut :

- Sesuai pasal 6 Perbup 52 / 2016, tugas kecamatan :
Membantu Bupati dalam meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
- Sesuai pasal 7 Perbup 52/2016, fungsi kecamatan:
 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 2. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
 9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Berdasarkan pasal 3 huruf a dan pasal 4 ayat (1),(2) dan (3) Perbup 52 / 2019, Susunan Organisasi Kecamatan Waiblama termasuk Tipe A yang terdiri dari:

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan membawahi:
 - Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Aset
3. Seksi Pemerintahan;

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 5. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 6. Seksi Sosial dan Ekonomi;
 7. Seksi Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik; dan
 8. Desa, yang terdiri atas : Kepala Desa, Sekretariat Desa, Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan Sosial dan Seksi Pelayanan Umum.
1. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon III-a atau jabatan administrator. Berdasarkan pasal 8 s/d 16 maka tugas dari masing-masing jabatan sesuai susunan struktur Kecamatan Waiblama (Tipe A), dan fungsi sebagai berikut:
 2. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, tatausaha, perlengkapan rumah tangga, urusan aparatur sipil Negara kepada semua unsur dilingkungan Kecamatan.

Sekretariat Kecamatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
3. Pengelolaan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
4. Pengelolaan urusan aparatur sipil negara; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam pelaksanaan tugas sekretariat dibantu oleh:

- Sub Bagian program, Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan koordinasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
 - d. penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
 - Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan dan aset.
- Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas

menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan dan aset;
- b. penatausahaan, akuntansi dan pembukuan keuangan dan aset;
- c. penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;
- d. penyiapan bahan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dan aset;
- e. pelaksanaan urusan persuratan;
- f. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- g. pelaksanaan urusan administrasi aparatur sipil negara dan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

3. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan, pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Desa dan/atau Kelurahan, mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan serta memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan/atau Kelurahan.

Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- c. Pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan/atau Kelurahan;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa dan/atau Kelurahan;
- e. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah dan Lembaga Masyarakat tingkat Kelurahan;
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan;

- i. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan perangkat desa;
 - j. Pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerjanya;
 - k. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan kerja sama antar Desa dan penyelesaian perselisihan antar desa;
 - l. Pelaksanaan fasilitasi penataan desa/kelurahan;
 - m. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa;
 - n. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pertanggung jawabannya;
 - o. Penyelenggaraan lomba/penilaian Desa/Kelurahan tingkat Kecamatan;
 - p. Pelaksanaan inventarisasi asset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
 - q. Pemberian rekomendasi/pertimbangan pengangkatan perangkat desa;
 - r. Pelaksanaan administrasi dan pengoordinasian penyelenggaraan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kerjanya; dan
 - s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan mengevaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- a. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan;
 - b. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan
 - c. Pelaksanaan fasilitas kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan;
 - d. Pembinaan dan pengawasan organisasi, kelompok masyarakat dan lembaga pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan;
 - e. Pembinaan lembaga adat;
 - f. Pelaksanaan dan pengawasan terhadap keseluruhan Unit Kerja baik Pemerintah maupun swasta yang melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- g. Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan kerja pemerintah maupun swasta;
 - h. Penyusunan laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan dan;
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
5. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan produk hukum daerah, pembinaan dan fasilitasi kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga profesi, pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi serta penanggulangan masalah sosial lainnya.
- Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- a. Pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerjanya;
 - e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan dan penegakan produk hukum daerah;
 - f. Pelaksanaan pembinaan ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa;
 - g. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga profesi;
 - h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana alam, pengungsi serta masalah sosial lainnya;
 - i. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan kerukunan hidupan tarumat beragama dan;
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

6. Seksi Sosial dan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kepramukaan, peranan wanita, keluarga berencana serta pelayanan kesehatan serta perekonomian tingkat kecamatan
- Seksi Sosial dan Ekonomi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tenaga kerja;
 - b. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan taman kanak-kanak dan pendidikan dasar di wilayah kerjanya;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, peranan wanita, program kesehatan masyarakat serta penyelenggaraan keluarga berencana;
 - d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan;
 - e. Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
 - f. Pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar;
 - g. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi produktif dan lembaga perekonomian tingkat kecamatan dan;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
7. Seksi Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tingkat kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan, pelaksanaan pelayanan publik dan pengelolaan administrasi pelayanan publik serta melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, instansi vertikal dan swasta dalam melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- Seksi Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- a. Pelaksanaan mobilisasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - b. Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - c. Pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;

- d. Pelaksanaan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayahnya;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;
- f. Pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah, instansi vertikal dan swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Pelaksanaan pemberian rekomendasi dan perizinan kepada masyarakat;
- i. Pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada masyarakat;
- j. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan;
- k. Pelaksanaan Administrasi Terpadu tingkat kecamatan;
- l. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan dan;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

1.2. Aspek Strategis Organisasi

Isu strategis sesuai tugas dan fungsi kecamatan dalam mewujudkan Rencana Strategis Kabupaten Sikka, yakni Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Waiblama Belum Baik dan yang selanjutnya dijabarkan dalam masalah pokok di Kecamatan Waiblama yaitu Pelayanan Publik di Kecamatan yang belum Optimal, sehingga perlu strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Tujuan yang akan dicapai Kecamatan Waiblama, yaitu : Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik yang responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat.

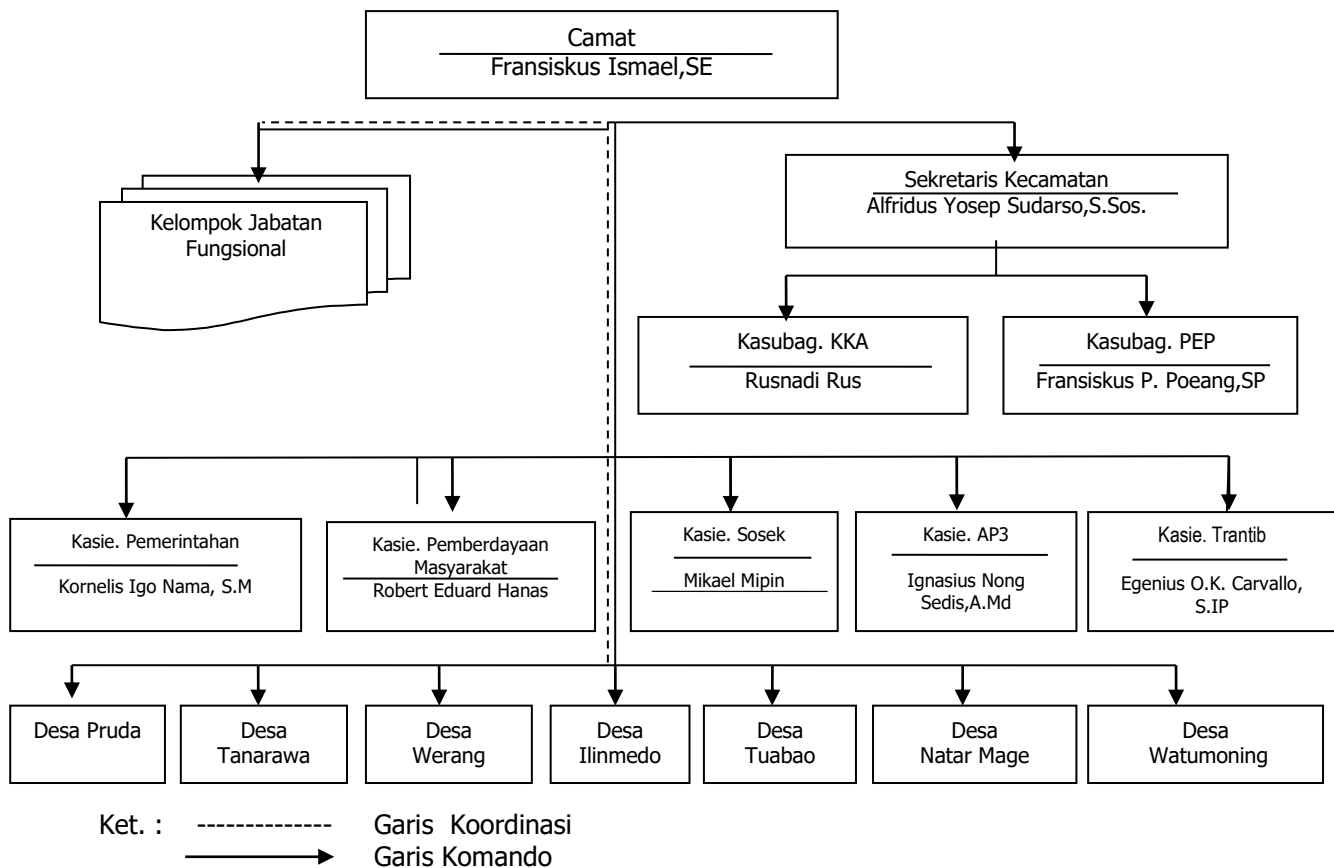
Sasaran Kecamatan Waiblama yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya pelayanan publik di kecamatan
2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja perangkat daerah.

1.3 Struktur Organisasi Kecamatan Waiblama

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Waiblama sebagai berikut:

Bagan 1.1.
Struktur Organisasi Tahun 2025



1.4. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Waiblama di dukung oleh 5 (lima) Program, 11 (sebelas) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan. Pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut didukung dengan anggaran sebesar Rp.1.549.398.925,00, yang telah ditetapkan melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Kecamatan Waiblama Tahun 2025, tanggal 03 Nopember 2025, dengan rincian sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 6 (enam) kegiatan dan 14 (empat belas) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan 1 (satu) sub kegiatan:

- *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan 2 (dua) sub kegiatan
 - *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;*
 - *Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;*
- 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan 5 (lima) sub kegiatan:
 - *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;*
 - *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;*
 - *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; dan*
 - *Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*
- 4. Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 2 (dua) sub kegiatan:
 - *Pengadaan Mebel*
 - *Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya*
- 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 2 (dua) sub kegiatan:
 - *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;*
 - *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.*
- 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 3 (tiga) sub kegiatan:
 - *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;*
 - *Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya; dan*
 - *Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kanto dan Bangunan Gedung Lainnya.*
- B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, dengan 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan 2 (dua) sub kegiatan:
 - *Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.*
 - *Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan.*
 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan 1 (satu) sub kegiatan dengan rician sebagai berikut:

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, dengan 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan rician sebagai berikut:

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan 1 (satu) sub kegiatan:
 - *Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*

D. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan rician sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah dengan 1 (satu) sub kegiatan:
 - *Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.*

E. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan rician sebagai berikut:

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasn Pemerintahan Desa dengan 1 (satu) sub kegiatan:
 - *Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*
 - *Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Asset Desa*

Program dan kegiatan serta pendanaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1.
Program dan Kegiatan Tahun 2025

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	
		Sebelum	Sesudah
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1.599.050.943	1.472.561.025
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.652.000	7.800.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.652.000	7.800.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.315.632.550	1.234.888.720
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.277.038.750	1.197.440.720
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	38.593.800	37,448.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	41.830.300	25.849.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.729.000	1.213.800
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.118.900	8.932.700

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN WAIBLAMA TAHUN 2025

	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	4.502.400	2.962.500
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	24.480.000	12.380.000
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	47.930.000	45.737.300
	<i>Pengadaan Mebel</i>	19.597.400	19.597.400
	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	28.332.600	26.139.900
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	64.773.480	37.363.092
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	6.352.704	6.352.704
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	58.420.776	31.010.388
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	120.232.613	121.282.913
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau lapangan</i>	89.142.413	89.142.713
	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya</i>	750.000	1.800.000
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kanto dan Bangunan Gedung Lainnya</i>	30.340.200	30.340.200
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	96,641.500	58.589.400
	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	84.425.700	51.776.900
	<i>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vetikal Terkait</i>	59.960.500	38.392.800
	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerinthan Di Tingkat Kecamatan</i>	24.466.200	13.384.100
	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat</i>	12.214.800	6.812.500
	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan</i>	12.214.800	6.812.500
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9.730.800	2.450.000
	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	9.730.800	2.450.000
	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	9.730.800	2.450.000
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8.441.100	7.398.500
	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	8.441.100	7.398.500
	<i>Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan</i>	8.441.100	7.398.500
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGWASAN PEMERINTAH DESA	23.111.600	8.400.000
	<i>Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi</i>	23.111.600	8.400.000

Pengawasan Pemerintah desa		
<i>Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>	8.234.800	4.200.000
<i>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Asset Desa</i>	8.864.800	4.200.000
<i>Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>	6.012.000	0,00
TOTAL PAGU ANGGARAN	1.736.975.943	1.549.398.925

1.5. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja

Berdasarkan Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 maka Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

- Kata Pengantar
- Ringkasan Eksekutif
- Daftar Isi
- Daftar Tabel

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Tugas, Fungsi dan wewenang Organisasi
- 1.2 Aspek Strategis Organisasi
- 1.3 Struktur Organisasi Kecamatan
- 1.4 Kegiatan Layanan Produk Organisasi
- 1.5 Sistematika Penyajian

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- 2.1. Dokumen Perencanaan Tahun 2024-2026
- 2.2. Dokumen Perencanaan Tahun 2025-2029

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2. Realisasi Anggaran

BAB IV : P E N U T U P

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Saran

L A M P I R A N :

1. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
2. Rencana Kerja Tahunan Perubahan Tahun 2025
3. Cascading Perubahan Tahun 2025.

4. Pohon Kinerja Perubahan Tahun 2025
5. Rencana Aksi Perubahan Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025
6. Pengukuran Capaian Kinerja Perubahan Tahun 2025
7. Realisasi Perubahan atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025
8. Surat Keputusan Camat Waiblama Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Waiblama Tahun 2024-2026, Tanggal 31 Desember 2024

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan tujuan dan sasaran dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Untuk mengukur kinerja diperlukan perencanaan kinerja yang disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka Tahun 2025–2029. Dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan mungkin timbul, Kecamatan Waiblama sesuai tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan Perencanaan Kinerja yang berorientasi hasil yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yang terintegrasi dalam Rencana Strategis Kecamatan Waiblama Tahun 2025-2029.

Visi

Visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi cita-cita daerah selama lima tahun yang akan datang untuk dicapai oleh Pemerintah daerah. Perumusan visi juga menjadi fondasi normatif yang menjadi arah dan orientasi strategis bagi penyelenggaraan pembangunan daerah. Dalam RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029, visi dirumuskan berdasarkan potensi, masalah, tantangan, peluang pembangunan, dan aspirasi masyarakat.

Perumusan visi pembangunan daerah disusun secara sistematis dengan berbagai pendekatan dan merepresentasikan harapan pembangunan daerah dari Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka yang terpilih untuk lima tahun ke depan. Visi RPJMD ini diharapkan mampu mengonsolidasikan potensi dan sumber daya daerah secara optimal untuk mewujudkan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang adaptif, inklusif, dan berkeadilan. Berikut visi dalam RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029:

“Terwujudnya Masyarakat Sikka yang Produktif, Kreatif, Unggul dan Mandiri Menuju Maumere Baru “.

Misi

Misi merupakan rumusan umum terkait upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029. Misi juga merupakan komitmen kepala daerah terpilih yang telah mendapatkan legitimasi langsung dari masyarakat. Wujud komitmen kepala daerah ini digambarkan dalam beberapa misi:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang unggul, inovatif, dan berkarakter sosial;
2. Meningkatkan distribusi dan kualitas pelayanan kesehatan yang berkeadilan dan mudah diakses;
3. Mewujudkan perekonomian yang stabil, mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan (STABIL: progres sama dengan tahun kembali);
4. Mewujudkan infrastruktur antarwilayah yang berkeadilan dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;
6. Meningkatkan kesadaran akan ketertiban hidup bermasyarakat;
7. Mewujudkan tata kelola birokrasi pemerintahan yang responsif, akuntabel, dan efisien serta Bebas KKN;
8. Mewujudkan Pembangunan yang kolaboratif, integratif dan berkesinambungan

2.1. Dokumen Perencanaan Tahun 2024-2026

2.1.1. Dokumen Renstra Kecamatan Waiblama Tahun 2024-2026

A. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis

▪ Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Kecamatan Waiblama Tahun 2024-2026 adalah **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan”**. Tujuan tersebut dapat dilihat dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Waiblama.

▪ Sasaran

Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Waiblama Tahun 2024-2026 adalah :

- a. Tersedianya sarana dan prasarana;
- b. Tersedianya sistem pelayanan informasi publik;
- c. Tersedianya mekanisme konsultasi dan pengaduan; dan
- d. Adanya inovasi pelayanan publik.

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Kecamatan Tahun 2024-2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah kecamatan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran kecamatan serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran kecamatan. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Dalam upaya pencapaian sasaran-sasaran Renstra Kecamatan Tahun 2024-2026, maka dirumuskan strategi sebagai berikut:

1. Tersedianya sarana dan prasarana meliputi :
 - a. Mengefektifkan pemanfaatan TIK dan papan informasi untuk memperkuat informasi pelayanan publik;
 - b. Mengefektifkan anggaran serta memanfaatkan program strategis pusat dan provinsi untuk meningkatkan fasilitas penunjang kecamatan;
 - c. Memanfaatkan regulasi untuk mengoptimalkan fasilitas penunjang di kecamatan.
2. Tersedianya Sistem Pelayanan Informasi Publik meliputi :
 - a. Memanfaatkan SDM yang memahami TIK dan meningkatkan kesadaran aparatur desa dalam menyediakan data yang akurat;
 - b. Memanfaatkan jaringan internet, media sosial, WEB kecamatan untuk meningkatkan kerja sama Lintas Sektor dan Forkopimca dalam menyampaikan informasi ke publik;
 - c. Memanfaatkan kotak saran dan media sosial sebagai ruang konsultasi dan pengaduan publik.
 - d. Menyediakan papan informasi, WEB kecamatan dan meningkatkan kesadaran aparatur desa dalam mengirimkan data ke kecamatan.
3. Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan meliputi :
 - a. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan dan konsultasi publik melalui kotak saran, media sosial dan ruang konsultasi publik;

- b. Membangun kerjasama Lintas Sektor, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Adat serta memanfaatkan SDM untuk mengakomodir konsultasi dan pengaduan;
 - c. Menyusun SOP sebagai panduan dan membangun kerjasama Lintas Sektor, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Adat serta memanfaatkan media sosial untuk optimalisasi pelayanan publik
4. Inovasi Pelayanan Publik, meliputi :
- a. Memanfaatkan Sumber Daya Aparatur, TIK, kearifan lokal, regulasi pelayanan publik melalui koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat;
 - b. Memanfaatkan regulasi pelayanan publik dan TIK untuk menyusun standar pelayanan minimal dan mengoptimalkan evaluasi pelayanan publik melalui kerja sama lintas sektor.
 - c. Menyusun Standar Pelayanan Minimal dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana, TIK, kearifan lokal, lomba inovasi, evaluasi pelayanan publik melalui kerja sama lintas sektor untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat
 - d. Meningkatkan koordinasi aparatur tingkat kecamatan untuk melaksanakan lomba inovasi dan pembentukan BUMDes bersama.

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi adalah dengan merumuskan arah kebijakan, sebagai berikut :

- 1. Memperkuat regulasi, mengefektifkan anggaran serta memanfaatkan program strategis pusat dan provinsi untuk meningkatkan fasilitas penunjang serta pemanfaatan TIK dan papan informasi untuk memperkuat informasi pelayanan.
- 2. Meningkatkan kesadaran Aparatur Desa dalam menyediakan data yang akurat untuk informasi publik dengan memanfaatkan SDM yang memahami TIK, jaringan internet, media sosial, WEB kecamatan, papan informasi serta meningkatkan kerja sama Lintas Sektor dan Forkopimca.
- 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan membangun kerja sama Lintas Sektor, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Adat serta menyusun SOP sebagai panduan dan memanfaatkan media sosial untuk optimalisasi pelayanan publik.
- 4. Menyusun Standar Pelayanan Minimal sesuai regulasi dengan mengoptimalkan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, TIK, kearifan lokal, lomba inovasi, evaluasi pelayanan publik melalui kerja sama lintas sektor untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan memanfaatkan regulasi pelayanan publik, standar pelayanan

minimal, mengoptimalkan evaluasi pelayanan publik melalui kerja sama lintas sektor dan meningkatkan koordinasi aparatur tingkat kecamatan untuk melaksanakan lomba inovasi dan pembentukan BUMDes bersama.

5. Memanfaatkan regulasi pelayanan publik, standar pelayanan minimal, mengoptimalkan evaluasi pelayanan publik melalui kerja sama lintas sektor dan meningkatkan koordinasi aparatur tingkat kecamatan untuk melaksanakan lomba inovasi dan pembentukan BUMDes bersama.

2.1.2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Waiblama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Waiblama Tahun 2024-2026 termuat dalam Surat Keputusan Camat Waiblama Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Waiblama Tahun 2024-2026, Tanggal 31 Desember 2024 (*Surat Keputusan Camat terlampir*) adalah sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN WAIBLAMA TAHUN 2025

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ ALASAN/ FORMULA PERHITUNGAN	SATUAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
I.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Formula perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di tingkat kecamatan digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan Nilai IKM = Nilai Total Rata-rata Tertimbang x 25	Indeks				
I.1	Tersedianya Sarana dan Prasarana	Indeks Sarana dan Prasarana	Formula perhitungan indeks sarana prasarana kecamatan dirancang untuk mengukur tingkat ketersediaan,	Indeks	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Sekretaris Kecamatan	APBD II

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN WAIBLAMA TAHUN 2025

			kualitas, dan sebaran fasilitas publik di wilayah kecamatan Jumlah Nilai skor x bobot <u>dari 7 aspek sarpras x 15</u> 100					
					Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kasubag PEP	APBD II
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kasubag KKA	APBD II
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	Kasubag KKA	APBD II
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kasubag KKA	APBD II
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kasubag KKA	APBD II
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kasubag KKA	APBD II

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN WAIBLAMA TAHUN 2025

I.2	Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Publik	Kemudahan akses, cepat, akurat dan akuntabel.	Formula perhitungan tersedianya sistem informasi pelayanan publik di tingkat kecamatan dirancang untuk mengukur sejauh mana sarana digital (website, aplikasi, media sosial) atau fisik (computer tersedia dan digunakan untuk memberikan informasi layanan kepada masyarakat. Jumlah nilai skor x bobot dari 3 aspek <u>Informasi Layanan Publik x 15</u> 100	%	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kasie.	APBD II
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kasie. AP3 dan Kasie Sosial dan Ekonomi	
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kasie.	APBD II
					Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kasie. Pemberdayaan Masyarakat	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN WAIBLAMA TAHUN 2025

1.3	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	Indikator Tersedianya SOP	Formula perhitungan mekanisme konsultasi dan pengaduan di kecamatan, yang umumnya merupakan bagian dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atau komponen Indeks Pelayanan Publik, dirancang untuk mengukur efektivitas dan kualitas respons kecamatan terhadap keluhan masyarakat.	%	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kasie.	APBD II
			Jumlah nilai skor x bobot dari 4 aspek <u>Konsultasi dan Pengaduan</u> x 15 100		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah		

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN WAIBLAMA TAHUN 2025

1.4	Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik	Indikator Capaian Inovasi Pelayanan Publik	Formula perhitungan tersedianya inovasi pelayanan publik di kecamatan dirancang untuk mengukur secara kuantitatif tingkat kreativitas dan pembaruan metode pelayanan guna meningkatkan kualitas serta kepuasan masyarakat. Jumlah nilai skor x bobot dari 1 aspek <u>Inovasi Pelayanan Publik x 15</u> 100	%	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan		Kasie. Kasie. Pemerintahan	APBD II APBD II
-----	--------------------------------------	--	--	---	--	--	--	-------------------------------

2.1.3. Rencana Kinerja Tahunan Perubahan Tahun 2025

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	76,71
1.	Tersedianya sarana dan prasarana	Indeks sarana dan prasarana	Indeks	74,43
2.	Tersedianya sitem informasi pelayanan public	Kemudahan akses cepat, akurat dan akuntabel	%	0,43
3.	Tersedianya mekanisme konsultasi dan pengaduan	Tersedianya SOP	%	2,00
4.	Adanya inovasi pelayanan publik	Inovasi pelayanan publik	%	0,8

Jumlah Anggaran sesuai DPPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.1.549.398.925,00

2.1.4. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 untuk Renstra 2024-2026 mengacu pada Peraturan Bupati Sikka Nomor 682 Tahun 2024 tentang tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2024 - 2026, maka Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Waiblama Kabupaten Sikka dapat digambarkan sebagai berikut :



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fransiskus Ismael , SE

Jabatan : Camat Waiblama

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Juvetus Yoris Prima Kago

Jabatan : Bupati Sikka

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

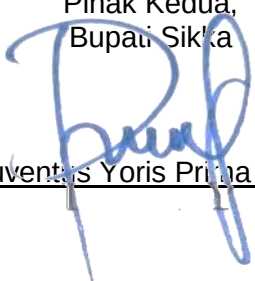
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

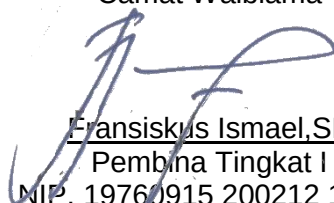
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanarawa, 03 Nopember 2025

Pihak Kedua,
Bupati Sikka


Juventus Yoris Prima Kago

Pihak Pertama,
Camat Waiblama


Fransiskus Ismael, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19760915 200212 1 008

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Camat Waiblama

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	76,71
1.		Tersedianya Sarana dan Prasarana	Indeks Sarana dan Prasarana	Indeks	74,43
2.		Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Publik	Kemudahan Akses Cepat, Akurat dan Akuntabel	%	0,43
3.		Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	Tersedianya SOP	%	2,00
4.		Adanya Inovasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik	%	0,8
NO	PROGRAM			ANGGARAN	KET.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota			1.472.561.025	APBD II
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			58.589.400	APBD II
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			2.450.000	APBD II
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum			7.398.500	APBD II
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			8.400.000	APBD II
	TOTAL ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2025			1.549.398.925	

Pihak Kedua,
Bupati Sikka

Juventus Yoris Priya Kago

Tanarawa, 03 Nopember 2025

Pihak Pertama,
Camat Waiblama

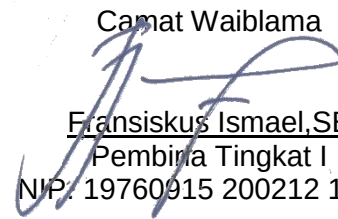
Fransiskus Ismael, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19760915 200212 1 008

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN WAIBLAMA TAHUN 2025

Tabel 2.4
Lampiran Rincian Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Program	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Anggaran
1.	Tersedianya Sarana dan Prasarana	Indeks Sarana dan Prasarana	%	74,43	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	1.472.561.025
2.	Tersedianya sistem Informasi Pelayanan Publik	Kemudahan Akses Cepat, Akurat dan Akuntabel	%	0,43	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	58.589.400
3.	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	Tersedianya SOP	%	2,00	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2.450.000
4.	Adanya Inovasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik	%	0,8	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	7.398.500
					Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.400.000

Camat Waiblama


Fransiskus Ismael, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19760915 200212 1 008

2.1.5. Keselarasan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Renstra PD dengan Keputusan Kepala PD tentang Indikator Kinerja Utama PD Tahun 2024-2026, Rencana Kinerja Tahunan Perubahan PD Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahunan Perubahan PD Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan PD Tahun 2025

Tabel . 2.5.

Keselarasn Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Renstra PD dengan Keputusan Kepala PD tentang Indikator Kinerja Utama PD Tahun 2024-2026, Rencana Kinerja Tahunan Perubahan PD Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahunan Perubahan PD Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan PD Tahun 2025

NO	IKU Perangkat Daerah		Rencana Kinerja Tahunan Perubahan Tahun 2025	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	LKJlp Perangkat Daerah Tahun 2025
	Dasar RENSTRA Tahun 2024-2026	Keputusan Camat Waiblama Tentang IKU Kecamatan Waiblama	Dasar Keputusan Camat Tentang IKU di Kec. Waiblama dan DPA /DPPA	Rencana Kinerja Tahunan Perubahan Tahun 2025 Dan DPA /DPPA	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
1.	IKM	IKM	IKM	IKM	IKM
2	Indeks Sarana dan Prasarana	Indeks Sarana dan Prasarana	Indeks Sarana dan Prasarana	Indeks Sarana dan Prasarana	Indeks Sarana dan Prasarana
3	Kemudahan Akses Cepat, Akurat dan Akuntabel	Kemudahan Akses Cepat, Akurat dan Akuntabel	Kemudahan Akses Cepat, Akurat dan Akuntabel	Kemudahan Akses Cepat, Akurat dan Akuntabel	Kemudahan Akses Cepat, Akurat dan Akuntabel
4	Tersedianya SOP	Tersedianya SOP	Tersedianya SOP	Tersedianya SOP	Tersedianya SOP
5	Inovasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik

Dari tabel 2.5. diatas dijelaskan bahwa ada keselarasan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Waiblama Tahun 2025 pada Renstra Kecamatan Waiblama Tahun 2024-2026, dengan Keputusan Camat Waiblama Tentang IKU Kecamatan Waiblama, Rencana Kinerja Tahunan Perubahan Tahun 2025 dan DPA/DPPA Tahun 2025 serta Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

2.2. Dokumen Perencanaan Tahun 2025-2029

2.2.1. Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

A. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis

▪ Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Waiblama dalam Rencana Strategis Kecamatan Waiblama Tahun 2025-2029 adalah **“Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik yang responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat.**

Tujuan tersebut dapat dilihat dengan indikator Indeks Pelayanan Publik di Kecamatan Waiblama

▪ Sasaran

Sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Waiblama Tahun 2025-2029 adalah :

1. Meningkatnya pelayanan publik di kecamatan.
2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja perangkat daerah.

▪ Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam upaya pencapaian sasaran-sasaran Renstra Kecamatan Waiblama Tahun 2025-2029, maka dirumuskan beberapa strategi sebagai berikut :

1. Penguatan SDM dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat.
2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat melalui fasilitasi, pendampingan, dan kolaborasi dalam program pemberdayaan desa dan kelurahan Digitalisasi Pelayanan Publik.

Arah kebijakan menjabarkan strategi pembangunan ke dalam program dan kegiatan yang lebih spesifik. Arah kebijakan berfungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan. Arah kebijakan membantu pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi adalah dengan merumuskan arah kebijakan, dan arah kebijakan yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Kecamatan Waiblama Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan aparatur, dan kolaborasi untuk pelayanan dan
2. Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel

2.2.2. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Waiblama

Tujuan, Sasaran dan target kinerja Renstra Kecamatan Waiblama Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029

NO	TUJUAN DAN SASARAN RENSTR	INDIKATOR TUJUAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ ALASAN/ FORMULA PERHITUNGAN	SATUAN	PROGRAM /KEGIATA	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DAN
1	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik yang responsif terhadap Kebutuhan		Indeks Pelayanan Publik. Formula perhitungan indeks pelayanan publik di kecamatan, yang umumnya merujuk pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atau Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Indeks				
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Formula perhitungan nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) kecamatan	Angka				

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN WAIBLAMA TAHUN 2025

			disusun untuk mengukur seberapa efektif, efisien, dan akuntabel sebuah kecamatan dalam mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan strategis. Nilai SAKIP tidak hanya menilai dokumen administratif, tetapi juga kualitas implementasi dan dampak kinerja terhadap masyarakat.					
				%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Sekretaris Kecamatan	APBD II
					Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kasubag PEP	APBD II
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kasubag KKA	APBD II

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN WAIBLAMA TAHUN 2025

					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	Kasubag KKA	APBD II
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kasubag KKA	APBD II
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kasubag KKA	APBD II
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharamya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kasubag KKA	APBD II
		Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Formula perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di tingkat kecamatan digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan	Indeks				APBD II

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN WAIBLAMA TAHUN 2025

			Nilai IKM = Nilai Total Rata-rata Tertimbang x 25					
				%	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kasie.	APBD II
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kasie. AP3 dan Kasie Sosial dan Ekonomi	
				%	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kasie.	APBD II
					Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksanannya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kasie. Pemberdayaan Masyarakat	
					Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kasie	APBD II
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksanannya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kasie Trantib	APBD II
				%	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kasie.	APBD II

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN WAIBLAMA TAHUN 2025

					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kasie. Trantib dan Kasie Sosek	APBD II
				%	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Kasie.	APBD II
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Kasie. Pem.	APBD II

2.2.3. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025

Rencana Kinerja Tahunan dan Target Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Renstra Kecamatan Waiblama Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.7
Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1.		Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	2,60
2.	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks	76,61
3.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	78,60

Jumlah Anggaran sesuai DPPA Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp.1.549.398.925,00**

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 untuk Renstra 2025-2029 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 - 2029, maka Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Waiblama Kabupaten Sikka dapat digambarkan sebagai berikut :

2.2.4. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fransiskus Ismael , SE

Jabatan : Camat Waiblama

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Juvetus Yoris Prima Kago

Jabatan : Bupati Sikka

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanarawa, 03 Nopember 2025

Pihak Kedua,
Bupati Sikka

Juvetus Yoris Prima Kago

Pihak Pertama,
Camat Waiblama

Fransiskus Ismael, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19760915 200212 1 008

Tabel 2.8
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Camat Waiblama

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik yang responsif terhadap Kebutuhan		Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	2,60
		Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks	76,61
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	78,60
NO	PROGRAM			ANGGARAN	KET.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota			1.472.561.025	APBD II
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			58.589.400	APBD II
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			2.450.000	APBD II
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum			7.398.500	APBD II
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			8.400.000	APBD II
	Jumlah Anggaran Perubahan Tahun 2025			1.549.398.925	

Tanarawa, 03 Nopember 2025

Pihak Kedua,
Bupati Sikka

Juvenius Yoris Prima Kago

Pihak Pertama,
Camat Waiblama

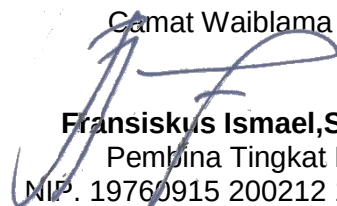
Fransiskus Ismael, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 199760915 200212 1 008

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN WAIBLAMA TAHUN 2025

Tabel 2.9
Lampiran Rincian Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Program	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Anggaran
1.		Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	2,60	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	1.472.561.025
2.	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks	76,61	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	58.589.400
3.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	78,60	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2.450.000
					Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	7.398.500
					Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.400.000

Camat Waiblama


Fransiskus Ismael, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19760915 200212 1 008

2.2.5. Keselarasan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Renstra PD dengan Keputusan Kepala PD tentang Indikator Kinerja Utama PD Tahun 2025-2029, Rencana Kinerja Tahunan Perubahan PD Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahunan Perubahan PD Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan PD Tahun 2025

Tabel . 2.10

Keselarasn Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Renstra PD dengan Keputusan Kepala PD tentang Indikator Kinerja Utama PD Tahun 2025-2029, Rencana Kinerja Tahunan Perubahan PD Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahunan Perubahan PD Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan PD Tahun 2025

3.

NO	IKU Perangkat Daerah		Rencana Kinerja Tahunan Perubahan Tahun 2025	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	LKJlp Perangkat Daerah Tahun 2025
	Dasar RENSTRA Tahun 2025-2029	Keputusan Camat Waiblama Tentang IKU Kecamatan Waiblama	Dasar Keputusan Camat Tentang IKU di Kec. Waiblama dan DPA /DPPA	Rencana Kinerja Tahunan Perubahan Tahun 2025 Dan DPA /DPPA	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
1	IPM	IPM	IPM	IPM	IPM
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Dari tabel 2.10. diatas dijelaskan bahwa ada tidak ada keselarasan indikator Kinerja Utama Kecamatan Waiblama Tahun 2025 pada Renstra Kecamatan Waiblama Tahun 2025-2029, dengan Keputusan Camat Waiblama Tentang IKU Kecamatan Waiblama, Rencana Kinerja Tahunan Perubahan Tahun 2025 dan DPA/DPPA Tahun 2025 serta Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disampaikan secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dimana hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya perbaikan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kecamatan Waiblama selaku pengemban amanah masyarakat, melaksanakan kewajiban menyusun Laporan Kinerja Kecamatan Waiblama sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 – 2029 serta Peraturan Bupati Sikka Nomor 20 Tahun 2025 tentang Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Laporan Kinerja memberikan gambaran penilaian terhadap tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Waiblama Tahun 2025-2029.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di Kecamatan Waiblama, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.1.1. Analisis Sesuai Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 berpedoman pada Dokumen Rencana Strategis Tahun 2024-2026

1. Analisis Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel. 3.1
Analisis Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	%
	Indeks Kepuasan Masyarakat	76,61	76,61	100
Tersedianya Sarana dan Prasarana	Indeks Sarana dan Prasarana	74,43	74,43	100
Tersedianya sistem Informasi Pelayanan Publik	Kemudahan Akses Cepat, Akurat dan Akuntabel	0,43	0,43	100
Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	Tersedianya SOP	2,00	2,00	100
Adanya Inovasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik	0,8	0,8	100

Berdasarkan tabel 3.1 .di atas bahwa capaian indikator sasaran, pada Tahun 2025 dapat dijelaskan sesuai dengan capain kinerja pada masing masing indikator kinerja utama sebagai berikut:

- Pencapaian Indikator Sasaran 1 : **Tersedianya Sarana dan Prasarana**, dengan indikator kinerja indeks sarana dan prasarana telah mencapai target.
- Pencapaian Indikator Sasaran 2 : **Tersedianya sistem Informasi Pelayanan Publik**, dengan indikator kinerja kemudahan akses Cepat, Akurat dan Akuntabel telah mencapai target.
- Pencapaian Indikator Sasaran 3 :**Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan**, dengan indikator kinerja tersedianya SOP telah mencapai target
- Pencapaian Indikator Sasaran 4 : **Adanya Inovasi Pelayanan Publik**, dengan indikator kinerja inovasi pelayanan publik telah mencapai target.
- Pencapaian Indikator Kinerja **Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)** mencapai target.

2. Analalisi Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Realisasi Tahun 2024 dan 2023.

Analisis Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Realisasi Tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 3.2
Analisis Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025
Dengan Tahun Realisasi Tahun 2024 dan 2023.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	Indeks Kepuasan Masyarakat	76,61	76,61	66,92	66,92
Tersedianya Sarana dan Prasarana	Indeks Sarana dan Prasarana	74,43	74,43	65,86	0,00
Tersedianya sistem Informasi Pelayanan Publik	Kemudahan Akses Cepat, Akurat dan Akuntabel	0,43	0,43	0,42	0,00
Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	Tersedianya SOP	2,00	2,00	1,00	0,00
Adanya Inovasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik	0,8	0,8	0,7	0,00

Berdasarkan tabel 3.2 .di atas bahwa capaian indikator sasaran, pada Tahun 2025 bila dibandingkan dengan tahun 2024 dan 2023, dapat dijelaskan sesuai dengan capain kinerja pada masing masing indikator kinerja utama sebagai berikut:

- Pencapaian indikator Kinerja **Indeks kepuasan masyarakat (IKM)** mengalami peningkatan sebesar 9,69.
- Pencapaian Indikator Sasaran 1 : **Tersedianya Sarana dan Prasarana.**
Indikator kinerja indeks sarana dan prasarana mengalami peningkatan sebesar 8,57. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana mengalami peningkatan antara tahun 2023, 2024 dan 2025 dengan capaian yang lebih baik sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan. Penyebabnya adalah adanya penyediaan sarana dan prasarana di kecamatan di tahun 2025.
- Pencapaian Indikator Sasaran 2 : **Tersedianya sistem Informasi Pelayanan Publik**

Indikator kinerja kemudahan akses Cepat, Akurat dan Akuntabel mengalami peningkatan sebesar 0,01 % . Hal ini menunjukkan bahwa tersedianya sistem informasi pelayanan publik mengalami peningkatan antara 2023, 2024 dan 2025 dengan capaian yang lebih baik sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan. Penyebabnya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengakses data dan informasi melalui media sosial, internet dan media lainnya;

▪ **Pencapaian Indikator Sasaran 3 :Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan.**

Indikator kinerja tersedianya SOP mengalami peningkatan sebesar 1 %. Hal ini menunjukkan bahwa tersedianya mekanisme konsultasi dan pengaduan meningkat menjadi lebih baik antara tahun 2023, 2024 dan 2025 dengan capaian yang lebih baik sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan. Penyebabnya adalah adanya kesadaran masyarakat dalam mekanisme konsultasi dan pengaduan melalui Musyawarah Desa, Rapat koordinasi tingkat kecamatan dan kerja sama antar lintas sektor maupun Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

▪ **Pencapaian Indikator Sasaran 4 : Adanya Inovasi Pelayanan Publik,**

Indikator kinerja inovasi pelayanan publik mengalami peningkatan sebesar 0,1 %. Hal ini menunjukkan bahwa adanya inovasi pelayanan publik meningkat menjadi lebih baik antara tahun 2023, 2024 dan 2025 dengan capaian yang lebih baik sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan. Penyebabnya adalah adanya kesadaran masyarakat untuk mengakses data dan informasi melalui media sosial, internet dan media sosial lainnya untuk pengembangan usaha pertanian perkebunan, peternakan dan kelautan serta hidup berkoperasi dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan Koperasi Desa Merah Putih.

- Pencapaian Indikator 1, 2 dan 3 pada Tahun 2023 nilainya 0,0 (nol) karena pencapaian indikator ini tidak termuat dalam Renstra kecamatan Waiblama 2024-2026.

3. Analisis perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target akhir Renstra 2024-2026

Analisis perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target akhir Renstra 2024-2026, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 3.3

Analisis Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025
Dengan Target Akhir Renstra Tahun 2024-2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	%
	Indeks Kepuasan Masyarakat	76,61	77,61	98,71
Tersedianya Sarana dan Prasarana	Indeks Sarana dan Prasarana	74,43	93,61	79,51
Tersedianya sistem Informasi Pelayanan Publik	Kemudahan Akses Cepat, Akurat dan Akuntabel	0,43	0,44	97,72
Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	Tersedianya SOP	2,00	3,00	66,67
Adanya Inovasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik	0,8	0,9	88,89

Berdasarkan tabel 3.3 .di atas bahwa capaian indikator sasaran, pada Tahun 2025 bila dibandingkan dengan Target Akhir Renstra 2024-2026, dapat dijelaskan sesuai dengan capain kinerja pada masing masing indikator kinerja utama sebagai berikut:

- Pencapaian Indikator Sasaran 1 : **Tersedianya Sarana dan Prasarana**

Indikator kinerja Indeks sarana dan prasarana mengalami peningkatan sebesar 79,51.

Faktor penyebab keberhasilan adalah :

- Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran di kecamatan Waiblama.
- Adanya perencanaan desa yang matang dalam kegiatan Forum SKPD tingkat kecamatan untuk peningkatan sarana dan prasarana di wilayah kecamatan.

- Pencapaian Indikator Sasaran 2 : **Tersedianya sistem Informasi Pelayanan Publik**

Indikator kinerja kemudahan akses cepat, akurat dan akuntabel mengalami peningkatan sebesar 97,72 %.

Faktor penyebab keberhasilan adalah kesadaran masyarakat untuk mengakses data dan informasi melalui media sosial, internet dan media lainnya.

- Pencapaian Indikator Sasaran 3 : **Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan.**

Indikator kinerja mekanisme konsultasi dan pengaduan mengalami peningkatan sebesar 66,67 %

Faktor penyebab keberhasilan adalah meningkatnya kesadaran masyarakat berkaitan dengan mekanisme konsultasi dan pengaduan melalui Musyawarah Desa dan rapat koordinasi tingkat kecamatan dan kerja sama antar lintas sektor maupun Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

- Pencapaian Indikator Sasaran 4 : **Adanya Inovasi Pelayanan Publik**

Indikator kinerja inovasi pelayanan publik mengalami peningkatan sebesar 88,89

Faktor penyebab keberhasilan adalah :

- Adanya kesadaran masyarakat untuk mengakses data dan informasi melalui media sosial, internet dan media sosial lainnya untuk pengembangan usaha pertanian perkebunan, peternakan dan kelautan serta hidup berkoperasi dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan koperasi Desa Merah Putih.
- Adanya koordinasi dan kerja lintas sektor dapat meningkatkan pengetahuan dibidang pendidikan dan kesehatan.
- Adanya koordinasi dan kerja lintas sektor dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan pelayanan kesehatan.

- Pencapaian indikator kinerja **Indeks kepuasan Masyarakat** mengalami peningkatan sebesar 98,71

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional dan Daerah lainnya.

Tabel 3.4.
Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025
dengan Standar Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Nasional	%
	Indeks Kepuasan Masyarakat	76,61	100 – 25,00 Sangat Baik – Tidak Baik	100
Tersedianya Sarana dan Prasarana	Indeks Sarana dan Prasarana	74,43	N/A	100
Tersedianya sistem Informasi Pelayanan Publik	Kemudahan Akses Cepat, Akurat dan Akuntabel	0,43	N/A	100
Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	Tersedianya SOP	2,00	N/A	100
Adanya Inovasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik	0,8	N/A	100

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik bahwa:

IKM unit Pelayanan A = Sangat Baik (88,31-100), B = Baik (76,61-88,30), C= Kurang Baik (65,00-76,60), dan D= Tidak Baik (25,00-64,99).

Berdasarkan tabel 3.4 .di atas dapat dijelaskan dijelaskan sebagai berikut:

- Pencapaian Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Waiblama dalam kaitan dengan Mutu Pelayanan dikategorikan “Baik” dan telah mencapai target:
- Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Sarana dan Prasarana telah mencapai target.
- Pencapaian Indikator Kinerja Kemudahan Akses Cepat, Akurat dan Akuntabel telah mencapai target
- Pencapaian Indikator Kinerja Tersedianya SOP telah mencapai target
- Pencapaian Indikator Kinerja Inovasi Pelayanan Publik telah mencapai target

Penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja adalah :

- Peningkatan kualitas pelayanan dengan menerapkan sistem digital, penyederhanaan prosedur, dan peningkatan profesionalisme aparatur kecamatan.
- Penyediaan layanan yang responsif, sarana dan prasarana yang memadai serta komunikasi yang terbuka dengan warga untuk memastikan kebutuhan terpenuhi.
- Kesiapan aparatur kecamatan dalam menjalankan urusan pemerintahan yang ditugaskan.
- Koordinasi yang baik antara pemerintah kecamatan dan desa serta instansi terkait dalam mendukung program pembangunan pelayanan publik
- Pemanfaatan anggaran secara optimal dengan memastikan program berjalan sesuai sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat

5. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah di Lakukan

Tabel. 3.5
Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan atau Peningkatan/
Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah di Lakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan	Alternatif/Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
	Indeks Kepuasan Masyarakat			
Tersedianya Sarana dan Prasarana	Indeks Sarana dan Prasarana	Penyebab Keberhasilan 1. Adanya kerja sama lintas sektor dan Forpimca	1. Mempertahankan kerja sama lintas sektor dan Forpimca	1. Menyediakan aparatur yang kompeten dan pengalaman khusus tentang pelayanan publik
Tersedianya sistem Informasi Pelayanan Publik	Kemudahan Akses Cepat, Akurat dan Akuntabel	2. Tersedianya jaringan internet	2. Mengoptimalkan jaringan internet yang ada	2. Menyediakan sarana dan prasarana khusus pendukung pelayanan publik.
Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	Tersedianya SOP	3. Adanya organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Adat	3. Menjalinkan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan Lembaga adat	3. Memperbaiki akses jalan ke desa dan jalan kabupaten
		4. Adanya program strategis dari propinsi dan pusat	4. Memanfaatkan program strategis dari pusat dan propinsi dengan mungkin	4. Menyediakan jaringan internet yang memadai di kecamatan
		5. Adanya anggaran dan regulasi	5. Memanfaatkan anggaran dan regulasi dengan baik	
		6. Adanya kearifan lokal	6. Mengoptimalkan kembali kearifan lokal untuk meningkatkan pelayanan	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN WAIBLAMA TAHUN 2025

		7. Tersedianya teknologi informasi dan komunikasi	7. Memanfaatkan teknologi informasi yang ada dalam pelayanan	
		8. Tersedianya media sosial	8. Memanfaatkan media sosial yang ada dalam pelayanan	

Berdasarkan tabel 3.5 .di atas bahwa capaian indikator sasaran, pada Tahun 2025 bila dibandingkan dengan analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta Alternatif solusi yang telah di lakukan, dapat dijelaskan sesuai dengan capain kinerja pada masing masing indikator kinerja utama sebagai berikut:

• Pencapaian Indikator Sasaran 1 : **Tersedianya Sarana dan Prasarana**

Indikator ini dicapai melalui 1 (satu) Program sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan 6 (enam) kegiatan yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; dan
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Adapun pencapaian indikator sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5.1
Analisis Pencapaian Indikator Sasaran
Tersedianya Sarana dan Parasarana

No.	Indikator Sasaran	Satuan	TAHUN 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi	
1.	Indeks tersedianya sarana dan prasarana	%	74,43	74,43	100

Adapun rincian kegiatan pencapaian indikator sasaran indeks tersedianya sarana dan prasarana dapat di lihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.5.2.
Penjelasan tentang Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 1
Tersedianya Sarana dan Prasarana

No	Uraian Indikator Kinerja Utama Tersedianya Sarana dan Prasarana	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi	
1	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Laporan	9	9	100

2	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	16 /14	16 /14	100
3	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	100
4.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	1	100
5	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	4	4	100
6	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	55	55	100
7	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	2	2	100
8	Jumlah Paket Penyediaan Barang Mebel	Paket	1	1	100
9	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Paket	3	3	100
10	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	12	100
11	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	12	100
12	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	6	100
13	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	6	100
14	Jumlah unit Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Unit	1	1	1 Unit

Berdasarkan Tabel 3.5.2 di atas dapat dijelaskan secara terperinci Analisis terhadap pencapaian indikator Sasaran 1 (satu) tahun 2025 sebagai berikut :

Pencapaian Indikator Tersedianya Sarana dan Prasarana telah dilaksanakan melalui kegiatan antara lain Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Penyediaan mebel,

Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya, , Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional atau lapangan, dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya serta Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya masing-masing sesuai dengan target dan realisasi capaian kinerjanya 100 %.

- Pencapaian Indikator Sasaran 2 : **Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Publik**, dengan indikator kinerja kemudahan akses Cepat, Akurat dan Akuntabel
- Pencapaian Indikator Sasaran 3 : **Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan**, dengan indikator kinerja tersedianya SOP
- Pencapaian Indikator Sasaran 4 : **Adanya Inovasi Pelayanan Publik**, dengan indikator kinerja inovasi pelayanan publik.

Pencapaian Indikator sasaran 2, sasaran 3 dan sasaran 4 didukung oleh 4 (empat) program yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan 2 (dua) Kegiatan yaitu Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan 1 (satu) Kegiatan yaitu Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan 1 (satu) Kegiatan yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah; dan
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan 1 (satu) Kegiatan yaitu Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pengawasan Pemerintah desa.

Adapun pencapaian 3 (tiga) indikator sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5.3
Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 2
Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Publik

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi	
1	Kemudahan akses cepat, akurat dan akuntabel	%	0,43	0,43	100

Adapun rincian kegiatan pencapaian indikator sasaran Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Publik dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5.4
Penjelasan Tentang Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 2
Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Publik

No	Uraian Indikator Kinerja Utama Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Publik	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi	
1	Jumlah Kegiatan Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Desa	Desa	7	7	100
2	Jumlah Kegiatan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Forum SKPD) Tingkat Kecamatan	Kegiatan	1	1	100
3	Jumlah koordinasi, fasilitasi dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Kegiatan	14	14	100
4	Jumlah koordinasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan di kecamatan	Kegiatan	8	8	100
5	Jumlah pengembangan usaha ekonomi produktif yang dibina	Kelompok	7	7	100
6	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina	Desa	7	7	100
7	Jumlah koordinasi dan monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Bagi Masyarakat yang telah dilaksanakan	Kegiatan	12	12	100

Berdasarkan Tabel 3.5.4 di atas dapat dijelaskan secara terperinci analisis terhadap pencapaian Indikator Sasaran 2 tahun 2025 sebagai berikut :

Pencapaian indkaktor Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Publik telah dilaksanakan melalui kegiatan antara lain memfasilitasi Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Desa, Kegiatan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Forum SKPD) Tingkat Kecamatan, melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan/kesehatan di Kecamatan, melaksanakan pembinaan organisasi kepemudaan, serta melaksanakan monitoring dan koordinasi penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat, masing-masing sesuai dengan target dan realisasi capaian kinerjanya 100 %.

Tabel 3.5.5
Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 3
Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi	
1	Tersedianya SOP	%	2,00	2,00	100

Adapun rincian kegiatan pencapaian indikator sasaran Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan dapat di lihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.5.6.
Penjelasan Tentang Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 3
Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan

No	Uraian Indikator Kinerja Utama Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi	
1	Jumlah koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/Atau TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Kegiatan	7	7	100
2	Jumlah koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan	Kegiatan	14	14	100
3	Jumlah koordinasi keamanan dan ketertiban di desa dan pembinaan linmas di tingkat desa	Kegiatan	14	14	100
4	Jumlah koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan masalah sosial lainnya	Kegiatan	12	12	100
5	Jumlah kegiatan pembinaan dan fasilitasi organisasi sosial kemasyarakatan, LSM dan lembaga profesi	Kegiatan	14	14	100
6.	Jumlah Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan yang telah dilaksanakan di Kecamatan	Kegiatan	9	9	100
7.	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan BPD yang telah dilaksanakan	Kegiatan	7	7	100
8.	Jumlah kegiatan pembinaan dan	Kegiatan	7	7	100

	pengawasa Kepala Desa bersama perangkat desa yang telah dilaksanakan				
--	--	--	--	--	--

Berdasarkan Tabel 3.5.6. di atas dapat dijelaskan secara terperinci Analisis terhadap pencapaian indikator Sasaran 3 tahun 2025 sebagai berikut :

Pencapaian indikator tersedianya mekanisme konsultasi dan pengaduan telah dilaksanakan melalui kegiatan antara lain: melaksanakan Koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/Atau TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan, koordinasi keamanan dan ketertiban di desa, pembinaan terhadap linmas, koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan masalah sosial lainnya, kegiatan pembinaan dan fasilitasi organisasi sosial kemasyarakatan, LSM, dan lembaga profesi, melaksanakan rapat koordinasi tingkat kecamatan, dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa bersama aparat desa, BPD bersama anggotanya, masing-masing sesuai dengan target dan realisasi capaian kinerjanya 100 %.

Tabel 3.5.7.
Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 4
Adanya Inovasi Pelayanan Publik

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi	
1	Inovasi Pelayanan Publik	%	0,8	0,8	100

Adapun rincian kegiatan pencapaian indikator sasaran persentase **Adanya Inovasi Pelayanan Publik** dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5.8
 Penjelasan Tentang Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 4
Adanya Inovasi Pelayanan Publik

No	Uraian Indikator Kinerja Utama Inovasi Pelayanan Publik	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi	
1	Jumlah monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa	Kegiatan	14	14	100
2	Jumlah monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPdes)	Kegiatan	7	7	100
3	Jumlah koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan	Kegiatan	2	2	100
4	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kegiatan	14	14	100
5	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Asset Desa	Kegiatan	7	7	100
6	Jumlah kegiatan koordinasi, evaluasi dan monitoring penanganan stunting dan Rabies	Kegiatan	14	14	100
7	Jumlah kegiatan koordinasi, evaluasi dan monitoring kegiatan Bumdes Ketahanan Pangan	Kegiatan	14	14	100
8	Jumlah kegiatan koordinasi, evaluasi dan monitoring kegiatan Koperasi Desa Merah Putih	Kegiatan	14	14	100

Berdasarkan Tabel 3.5.8 di atas dapat dijelaskan secara terperinci analisis terhadap pencapaian indikator Sasaran 4 tahun 2025 sebagai berikut :

Pencapaian indikator Adanya Inovasi Pelayanan Publik telah dilaksanakan melalui kegiatan antara lain: melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa, melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPdes), melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan, Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Asset Desa, dan koordinasi, evaluasi dan monitoring kegiatan Bumdes Ketahanan Pangan dan Koperasi Desa Merah Putih, masing-masing sesuai dengan target dan realisasi capaian kinerjanya 100 %.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**❖ Efisiensi Sumber Daya Keuangan**

Sumber daya keuangan sebagai pendukung utama capaian kinerja menjadi sangat penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pencapaian kinerja organisasi. Efisiensi Sumber Daya Keuangan yang diterjadi di Kecamatan Waiblama adalah :

- Melakukan efisiensi anggaran atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Waiblama dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.6
Efisiensi Anggaran Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Anggaran		Selisih
		Induk 2025 (Rp)	Perubahan 2025 (Rp)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.599.050.943	1.472.561.025	126.489.918
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	96,641.500	58.589.400	38.052.100
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	9.730.800	2.450.000	7.280.800
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	8.441.100	7.398.500	1.042,600
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23.111.600	8.400.000	14.711.600
	Jumlah	1.736.975.943	1.549.398.925	187.577.018

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa pada tahun 2025 efisiensi anggaran sebesar Rp. 187.577.018.

❖ Efektivitas Sumber Daya Manusia

Tahun 2025 ASN berjumlah 16 (enam belas) orang yang terdiri 13 (tiga belas) orang berstatus PNS dan 3 (tiga) orang berstatus PPPK.

Efektivitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang diterapkan kecamatan Waiblama adalah :

- Meratanya Beban Kerja Pegawai : Camat dan Sekretaris Kecamatan berhasil membagi tugas, sehingga tidak ada penumpukan pekerjaan pada satu aparatur saja.

- Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

❖ Efisiensi Waktu

Efisiensi waktu yang dilaksanakan di kecamatan Waiblama adalah

- Kepatuhan Jam Kerja (On-time): Pegawai hadir, melayani, dan menyelesaikan berkas (seperti tanda tangan Camat/Sekcam) tepat pada waktunya tanpa membuat warga menunggu berhari-hari.
- Aparatur pelayanan yang kompeten dan responsif sehingga mempercepat proses administrasi.
- Pelayanan administrasi yang tidak berbelit-belit, berkurangnya penundaan berlarut, dan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi.

❖ Efisiensi Sarana dan Prasarana

Efisiensi sarana dan prasarana yang dilaksanakan di kecamatan Waiblama adalah

- Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang ada dan digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025

7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Analisis program dan kegiatan untuk pencapaian target kinerja adalah proses evaluasi yang membandingkan realisasi program dan kegiatan dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun 2025 pencapaian target kinerja Kecamatan Waiblama berdasarkan hasil Laporan Evaluasi Rencana Kerja(Renja) Triwulan Tahun 2025 adalah **90,99** dengan predikat **Tinggi**

3.1.2. Analisis Sesuai Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 berpedoman pada Dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029

1. Analisis perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel. 3.7
Analisis Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	%
	Indeks Pelayanan Publik (indeks)	2,60	0,75	28,84
Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	76,61	76,61	100
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,80	Belum ada penilaian	0,00

Berdasarkan tabel 3.7 .di atas bahwa capaian indikator sasaran, dapat dijelaskan sesuai dengan capain kinerja pada masing masing indikator kinerja utama sebagai berikut:

- Pencapaian Indikator Sasaran 1 : **Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan**, dengan indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan telah mencapai target.
- Pencapaian Indikator Sasaran 2 : **Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah**, dengan indikator kinerja Angka Nilai SAKIP Perangkat Daerah belum ada penilaian.
- Pencapaian indikator Kinerja **Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (IPP)** Kecamatan Waiblama belum memenuhi target dan masih dalam kategori "F ", yaitu **Prioritas Pembinaan**.

2. Analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun realisasi tahun 2024

Tabel. 3.8
Analisis Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025
Dengan Tahun Realisasi Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
	Indeks Pelayanan Publik (indeks)	2,60	0,75	0,00
Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	76,61	76,61	66,92
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,80	Belum ada penilaian	79,66

anggaran serta kinerja Perangkat Daerah				
---	--	--	--	--

Berdasarkan tabel 3.8 .di atas bahwa capaian indikator sasaran tahun 2025 bila dibandingkan dengan tahun 2024, dapat dijelaskan sesuai dengan capain kinerja pada masing masing indikator kinerja utama sebagai berikut:

- Pencapaian Indikator Sasaran 1 : **Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan.**

Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan mengalami peningkatan sebesar 9,69. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di kecamatan disebabkan oleh peningkatan kualitas pelayanan publik, yang meliputi perbaikan kemudahan persyaratan, prosedur, kecepatan waktu, kejelasan biaya, kompetensi aparat, sarana prasarana, serta adanya mekanisme pengaduan dan saran yang efektif, didukung oleh profesionalisme SDM, inovasi, dan transparansi yang membuat masyarakat merasa lebih dilayani dengan baik dan profesional.

- Pencapaian Indikator Sasaran 2 : **Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah.**

Indikator kinerja, Angka Nilai SAKIP Perangkat Daerah belum ada penilaian. Nilai SAKIP untuk Kecamatan Waiblama pada Tahun 2024 adalah **79,66** dengan predikat **Sangat Baik**.

- Pencapaian indikator Kinerja **Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (IPP)**, Kecamatan Waiblama belum memenuhi target dan masih dalam kategori **"F"** adalah **Prioritas Pembinaan**.

3. Analisis perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target akhir Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tabel. 3.9
Analisis Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025
Dengan Target Akhir Renstra Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	%
	Indeks Pelayanan Publik (indeks)	0,75	3,10	24,19
Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	76,61	81,61	93,64

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Belum ada penilaian	80,00	0,00
--	------------------------------	---------------------	-------	------

Berdasarkan tabel 3.9 .di atas bahwa capaian indikator sasaran, pada Tahun 2025 bila dibandingkan dengan Target Akhir Renstra 2025-2029, dapat dijelaskan sesuai dengan capain kinerja pada masing masing indikator kinerja utama sebagai berikut:

- Pencapaian Indikator Sasaran 1 : **Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan**
Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan mengalami peningkatan sebesar 93,64. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di kecamatan biasanya disebabkan oleh peningkatan kualitas pelayanan publik, yang meliputi perbaikan kemudahan persyaratan, prosedur, kecepatan waktu, kejelasan biaya, kompetensi aparat, sarana prasarana, serta adanya mekanisme pengaduan dan saran yang efektif, didukung oleh profesionalisme SDM, inovasi, dan transparansi yang membuat masyarakat merasa lebih dilayani dengan baik dan profesional.
- Pencapaian Indikator Sasaran 2 : **Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah.**
Indikator kinerja, Angka Nilai SAKIP Perangkat Daerah belum ada penilaian.
- Pencapaian Indikator Kinerja **Indeks Pelayanan Publik** untuk mencapai target akhir Renstra masih membutuhkan perbaikan dan peningkatan dalam mutu pelayanan.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional dan Daerah Lain.

Tabel 3.10
Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025
dengan Standar Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Nasional	%
	Indeks Pelayanan Publik (indeks)	0,75	1,00 – 5,00 (Gagal s.d. Pelayanan Prima)	32,32
Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	76,61	76,61 - 88,30 (Baik)	100
Meningkatnya kapasitas dan	Nilai SAKIP Perangkat	0,00 (Belum ada	80,00 – 90,00 AA memuaskan	0,00

akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Daerah	Penilaian)	s.d.0,00- 30,00 D buruk sekali)	
---	--------	-------------	---------------------------------	--

- Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik bahwa:

IKM unit Pelayanan A = Sangat Baik (88,31-100), B = Baik (76,61-88,30), C= Kurang Baik (65,00-76,60), dan D= Tidak Baik (25,00-64,99).

- Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik bahwa:

Range Nilai Kategori Makna 0 – 1,00 F= Gagal, 1,01-1,50 E= Sangat Buruk, 1,51-2,00 D=Buruk, 2,01-2,50 C=Cukup (Dengan Catatan), 2,51 – 3,00 C = Cukup 3,01 – 3,50, B=Baik (Dengan Catatan), 3,51 – 4,00 B=Baik, 4,01-4,50 A = Sangat Baik. Dan 4,51 – 5,00 A Pelayanan Prima.

- Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa: 90 - 100 (AA - Sangat Memuaskan), 80 - 90 (A - Memuaskan), 70 - 80 (BB - Sangat Baik), 60 - 70 (B - Baik), 50 - 60 (CC - Cukup), 30 - 50 (C - Kurang) dan 0 - 30 (D - Buruk)

Berdasarkan tabel 3.10 .di atas bahwa dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Capaian indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan bila dibandingkan standar Nasional yaitu 76,61 bernilai B dengan kategori Baik.

Penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah dilakukan adalah :

- Peningkatan kualitas pelayanan dengan menerapkan sistem digital, penyederhanaan prosedur, dan peningkatan profesionalisme aparatur kecamatan.
- Penyediaan layanan yang responsif, sarana dan prasarana yang ada serta komunikasi yang terbuka dengan warga untuk memastikan kebutuhan terpenuhi.
- Kesiapan aparatur kecamatan dalam menjalankan urusan pemerintahan yang ditugaskan.
- Koordinasi yang baik antara pemerintah kecamatan dan desa serta instansi terkait

dalam mendukung program pembangunan pelayanan publik

- Pemanfaatan anggaran secara optimal dengan memastikan program berjalan sesuai sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
- Capaian indikator sasaran Nilai SAKIP Kecamatan Waiblama bila dibandingkan standar Nasional belum ada penilaian.
- Capaian indikator sasaran Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Waiblama bila dibandingkan standar Nasional belum memenuhi target. Target yang dicapai adalah 0,75 - F = Gagal dan masih prioritas pembinaan.

5. Analisis Penyebab Kerhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Tabel. 3.11
Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan
atau Peningkatan/Penurunan Kinerja
Serta Alternatif Solusi yang Telah di Lakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan	Alternati/Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
	Indeks Pelayanan Publik	Penyebab Kegagalan : 1. Belum ada Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..		
		2. Proses penyusunan dan perubahan Standar Pelayanan (SP) belum melibatkan unsur masyarakat.		
		3. Belum ada tindak lanjut dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat untuk seluruh jenis pelayanan		
		4. Tidak tersedianya Sumber daya Manusia khusus Pelayanan Publik		
		5. Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik. belum ada		
		6. Tidak Tersedia Sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan.		
		7. Penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi) belum ada		
Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Penyebab Keberhasilan 1. Adanya Sarana dan Prasarana : Penyediaan fasilitas kantor yang nyaman, bersih, dan menunjang (seperti ruang tunggu, Komputer atau gedung). 2. Transparansi biaya dan Kepastian Layanan: Kejelasan biaya (atau gratis untuk layanan tertentu) dan hilangnya praktik pungli, yang meningkatkan kepercayaan masyarakat	1. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada. 2. Transparansi pelayanan : dengan layanan administrasi gratis untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat	Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik yang ada Menyediakan aparatur yang kompeten dan pengalaman khusus tentang pelayanan publik

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN WAIBLAMA TAHUN 2025

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	3. Tindak Lanjut Pengaduan: Adanya mekanisme penanganan pengaduan yang efektif, di mana saran dan masukan masyarakat benar-benar didengar dan ditindaklanjuti untuk perbaikan.	3. Mempertahankan mekanisme penanganan pengaduan yang efektif, di mana saran dan masukan masyarakat benar-benar didengar dan ditindaklanjuti untuk perbaikan.	Memperbaiki akses jalan desa dan Kabupayen
		4. Kecepatan dan Ketepatan Waktu: Pelayanan Pengurangan waktu tunggu dan penyelesaian layanan administrasi yang lebih cepat	4. Mempertahankan kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan	Peningkatan jaringan internet dan listrik yang memadai di kecamatan
		5. Memiliki Kompetensi dan Perilaku Aparatur: Aparatur yang lebih ramah, menyenangkan, kompeten, dan memiliki sikap responsif terhadap kebutuhan masyarakat	5. Mempertahankan Kompetensi dan Perilaku Aparatur: Aparatur yang lebih ramah, menyenangkan, kompeten, dan memiliki sikap responsif terhadap kebutuhan masyarakat	
		6. Inovasi Layanan (E- Government): Penerapan sistem informasi atau aplikasi digital yang mempermudah pengurusan dokumen (misalnya, integrasi dengan data dan pengiriman berkas melalui WhatsApp/aplikasi	6. Mempertahankan Inovasi Layanan (E-Government)	
		7. Perencanaan kinerja yang berkualitas	7. Mempertahankan perencanaan kinerja yang berkualitas	
		8. Pengukuran dan Pemantauan Kinerja yang akurat		
		9. Komitmen aparatur dan kepemimpinan (Adanya komitmen bersama dari tingkat camat hingga staf untuk membangun kerjasama, baik internal kecamatan maupun dengan pemerintah daerah	8. Mempertahankan Komitmen aparatur dan kepemimpinan	
		10. Evaluasi Internal: Dilaksanakannya evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang dan berkualitas, sehingga memberikan dampak nyata pada efisiensi dan efektivitas.	9. Melaksanakan kegiatan evaluasi internal	
		11. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi (Perbaikan Berkelanjutan		

Dari tabel 3.11. diatas dapat dijelaskan bahwa ada kegagalan dan keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja.

Penyebab keberhasilan pencapaian target sebagai berikut

❖ **Pencapaian Indikator Sasaran 1 : Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan**

Penyebab keberhasilan adalah:

- a. Adanya Sarana dan Prasarana : Penyediaan fasilitas kantor yang nyaman, bersih, dan menunjang (seperti ruang tunggu, Komputer atau gedung);
- b. Transparansi biaya dan Kepastian Layanan: Kejelasan biaya (atau gratis untuk layanan tertentu) dan hilangnya praktik pungli, yang meningkatkan kepercayaan masyarakat;
- c. Tindak Lanjut Pengaduan: Adanya mekanisme penanganan pengaduan yang efektif, di mana saran dan masukan masyarakat benar-benar didengar dan ditindaklanjuti untuk perbaikan;
- d. Kecepatan dan Ketepatan Waktu: Pelayanan pengurangan waktu tunggu dan penyelesaian layanan administrasi yang lebih cepat;
- e. Memiliki Kompetensi dan Perilaku Aparatur: Aparatur yang lebih ramah, menyenangkan, kompeten, dan memiliki sikap responsif terhadap kebutuhan masyarakat; dan
- f. Inovasi Layanan (E- Government): Penerapan sistem informasi atau aplikasi digital yang mempermudah pengurusan dokumen (misalnya, integrasi dengan data dan pengiriman berkas melalui WhatsApp/aplikasi).

❖ **Pencapaian Indikator Sasaran 2 : **Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah.****

Pada tahun 2025, pencapaian indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah belum ada penilaian. Nilai SAKIP untuk Kecamatan Waiblama pada Tahun 2024 adalah **79,66** dengan predikat **Sangat Baik**.

Penyebab keberhasilan adalah :

- a. Perencanaan kinerja yang berkualitas;
- b. Pengukuran dan Pemantauan Kinerja yang akurat;
- c. Komitmen aparatur dan kepemimpinan (Adanya komitmen bersama dari tingkat camat hingga staf untuk membangun kerjasama, baik internal kecamatan maupun dengan pemerintah daerah;
- d. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi (Perbaikan Berkelanjutan); dan

- e. Evaluasi Internal: Dilaksanakannya evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang dan berkualitas, sehingga memberikan dampak nyata pada efisiensi dan efektivitas.; dan

Penyebab kegagalan Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Waiblama adalah:

- Belum ada Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..
- Proses penyusunan dan perubahan Standar Pelayanan (SP) belum melibatkan unsur masyarakat.
- Belum ada tindak lanjut dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat untuk seluruh jenis pelayanan
- Tidak tersedianya Sumber Daya Aparatur khusus Pelayanan Publik
- Tidak Tersedia Sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan.
- Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik. belum ada
- Penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi) belum ada

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

❖ Analisis Sumber Daya Keuangan

Efisiensi Sumber Daya Keuangan yang dilaksanakan kecamatan Waiblama adalah :

- Melakukan efisiensi anggaran atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Waiblama dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.12
Efisiensi Anggaran Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Anggaran		Selisih
		Induk 2025 (Rp)	Perubahan 2025 (Rp)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.599.050.943	1.472.561.025	126.489.918
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	96,641.500	58.589.400	38.052.100
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	9.730.800	2.450.000	7.280.800
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	8.441.100	7.398.500	1.042,600
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23.111.600	8.400.000	14.711.600
	Jumlah	1.736.975.943	1.549.398.925	187.577.018

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa pada tahun 2025 efisiensi anggaran sebesar Rp. 187.577.018.

❖ Efektivitas Sumber Daya Manusia

Efektivitas Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan oleh Kecamatan Waiblama adalah:

1. **Penempatan Sesuai Kompetensi:** Pegawai ditempatkan pada posisi yang paling sesuai dengan keahliannya.
2. **Digitalisasi Layanan:** mengembangkan layanan online untuk mempermudah dan mempercepat proses pelayanan administrasi.
3. Pegawai menunjukkan tanggung jawab yang tinggi terhadap tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masing-masing, tidak hanya menunggu perintah atasan.

❖ Efisiensi Waktu

Efisiensi Waktu yang dilaksanakan oleh Kecamatan Waiblama adalah:

1. Penggunaan WhatsApp atau aplikasi lokal untuk kegiatan pelayanan administrasi masyarakat;
2. Pendekatan lokasi pelayanan administrasi kepada masyarakat.

❖ Efisiensi Sarana dan Prasarana

Tabel 3.13
Sarana dan Prasarana Kantor
Tahun 2025

NO	JENIS FASILITAS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Gedung Kantor Camat	1 unit	Kondisi kurang baik
2	Ruang Rapat / Aula	1 ruang	Kondisi kurang baik
3	Ruang Kerja	6 Ruang	2 Kondisi baik, 4 kondisi kurang baik
4	Meja Kerja	21 buah	16 Kondisi baik, 5 Kondisi rusak berat
5	Meja Rapat	3 buah	2 kondisi rusak ringan, 1 Kondisi baik
6	Kursi Kerja	12 buah	12 Kondisi rusak ringan
7	Kursi Rapat	50 buah	50 Kondisi baik
8	Papan Data	6 buah	Kondisi baik
9	Papan Informasi	1 buah	Kondisi baik
10	Komputer	1 buah	Kondisi rusak berat
11	Lemari Rak	4 buah	Kondisi baik

12	Lemari Arsip Kaca	5 buah	Kondisi baik
13	Sofa	2 set	Kondisi baik
14	Laptop	3 Unit	2 kondisi baik, 1 Kondisi rusak ringan
15	Printer	3 buah	2 Kondisi baik dan 1 Rusak Berat
16	AC	1 buah	Kondisi rusak berat
17	Sound System	1 unit	Kondisi baik
18	Mesin Potong Rumput	2 unit	1 Kondisi baik, 1 Kondisi rusak
19	Komfor Minyak	1 buah	kondisi baik
20	Peralatan Rumah Tangga	1 set	Kondisi baik
21	Genset	1 unit	Rusak
22	Hilux Dobel Gardan	1 Unit	Kondisi baik
23	Honda Mega Pro EB 2203 WB	1 Unit	Kondisi rusak
24	Honda Versa EB 2123 WB	1 Unit	Kondisi baik
25	Honda Versa EB 2332 WB	1 Unit	Kondisi baik
26	Supra 125 CW EB. 2333 WB	1 unit	Kondisi rusak ringan
27	Supra 125 CW EB. 2334 WB	1 unit	Kondisi rusak ringan
28	Honda Versa EB 2388 WB	1 unit	Kondisi baik
29	PC	1 Unit	Kondisi Baik
30	Kipas Angin	2 Unit	Kondisi Baik

Efisiensi sarana dan prasarana yang diterapkan di kecamatan Waiblama adalah

- Menggunakan sarana dan prasarana yang ada dan digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.

3.2. Realisasi Anggaran

Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Waiblama melaksanakan 5 (lima) Program, 11 (sebelas) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) Sub Kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut didukung dengan anggaran sebesar Rp.1.549.398.925,00 yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 1.202.240.720,00, belanja barang dan jasa sebesar Rp. 301.420.905,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 45.737.300,00. Sampai dengan triwulan ke empat tahun anggaran 2025, realisasi pelaksanaan anggaran sebesar Rp.1.430.444.520,00 atau sebesar 92,32 % dengan rincian belanja pegawai realisasi anggaran sebesar Rp. 1.102.749.975,00 atau sebesar 91,72 %, belanja barang dan

jasa realisasi anggaran sebesar Rp. 263.822.046,00 atau sebesar 87,53 % dan belanja modal realisasi anggaran sebesar .Rp. 43.872.499,00 atau sebesar 95,92 %.

Tabel 3.14
Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2025

NO	BELANJA OPERASI	PAGU DANA	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	Belanja Daerah	1.549.398.925,00	1.430.444.520,00	92,32
1	Belanja Operasi	1.503.661.625,00	1.366.572.021,00	90,88
	Belanja Pegawai	1.202.240.720,00	1.102.749.975,00	91,72
	Belanja Barang dan Jasa	301.420.905,00	263.822.046,00	87,53
2	Belanja Modal	45.737.300,00	43.872.499,00	95,92

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN WAIBLAMA TAHUN 2025

Tabel 3.15
Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025

No	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran/Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Renstra Tahun 2024-2026						
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana						
	Indeks Sarana dan Prasarana				74,43	74,43	100
	Renstra Tahun 2025-2029						
2	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah						
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				78,80	0,00	0,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1.472.561.025	1.356.300.484	92,10	100	100	100
	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1.472.561.025	1.356.300.484	92,10	100	100	100
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
	Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.800.000	7.700.000	98,72	100 %	100 %	100
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>						
	<i>Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun</i>	7.800.000	7.700.000	98,72	9 Lap	9 Lap	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.234.888.720	1.135.264.975	91,93	12 Bulan	12 Bulan	100
	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	1.197.440.720	1.097.949.975	91,66	15 Orang	15 Orang	100
	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	1.197.440.720	1.097.949.975	91,66	15 Orang	15 Orang	100
	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD</i>	37.448.000	37.315.000	99,64	12 Dok.	12 Dok.	100

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN WAIBLAMA TAHUN 2025

	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	37.448.000	37.315.000	99,64	12 Dok.	12 Dok.	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	25.489.000	18.224.474	71,50	100 %	100 %	100
	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah						
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.213.800	1.200.000	98,86	1 Paket	1 Paket	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8.932.700	8.896.134	99,59	4 Paket	4 Paket	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.962.500	2.878.340	97,16	2 Paket	2 Paket	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.380.000	5.250.000	42,41	55 Lap	55 Lap	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45.737.300	43.872.499	95,92	65 Unit	65 Unit	100
	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.737.300	43.872.499	95,92	65 Unit	65 Unit	100
	Pengadaan Mebel						
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	19.597.400	19.522.999	99,62	58 Unit	58 Unit	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	26.139.900	24.349.500	93,15	7 Unit	7 Unit	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.363.092	35.904.581	96,10	100%	100%	100
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.363.092	35.904.581	96,10	100%	100%	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	6.352.704	4.894.193	77,04	12 Lap	12 Lap	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	31.010.388	31.010.388	100	6 Lap	6 Lap	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	121.282.913	115.333.955	95,09	100%	100%	100

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN WAIBLAMA TAHUN 2025

	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau lapangan</i>						
	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	89.142.713	88.813.955	88,63	6 Unit	6 Unit	100
	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya</i>						
	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	1.800.000	1.800.000	100	6 Unit	6 Unit	100
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Gedung Lainnya</i>						
	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	30.340.200	24.720.000	81,48	1 Unit	1 Unit	100
	Renstra Tahun 2024-2026						
	Indeks Kepuasan Masyarakat				76,61	76,61	100
3	Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Publik						
	Kemudahan akses, cepat, akurat dan akuntabel				0,43	0,43	100
4	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan						
	Tersedianya SOP				2,00	2,00	100
5	Adanya Inovasi Pelayanan Publik						
	Inovasi Pelayanan Publik				0,8	0,8	100
	Renstra Tahun 2025-2029						
6	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan						
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan				76,61	76,61	100
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	58.589.400	58.144.723	99,24	100	100	100
	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	58.589.400	58.144.723	99,24	100	100	100
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	51.776.900	51.412.803	99,30	100%	100%	100
	Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan						
	<i>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vetikal Terkait</i>						
	<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>	38.392.800	38.382.040	99,97	12 Lap	12 Lap	100
	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerinthan Di Tingkat Kecamatan</i>						

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN WAIBLAMA TAHUN 2025

	<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	13.384.100	13.030.763	97,36	1 Dok	1 Dok	100
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	6.812.500	6.731.920	98,82	1 Lap	1 Lap	100
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat						
	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan</i>						
	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	6.812.500	6.731.920	98,82	1 Lap	1 Lap	100
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.450.000	2.399.900	97,96	100	100	100
	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.450.000	2.399.900	97,96	100	100	100
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2.450.000	2.399.900	97,96	100	100	100
	Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						
	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>						
	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	2.450.000	2.399.900	97,96	1 Lap	1 Lap	100
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.398.500	7.299.413	98,66	100	100	100
	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.398.500	7.299.413	98,66	100	100	100
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.398.500	7.299.413	98,66	100 %	100 %	100
	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						
	<i>Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan</i>						
	<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	7.398.500	7.299.413	98,66	1 Dok	1 Dok	100
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGWASAN PEMERINTAH DESA	8.400.000	6.300.000	75,00	100	100	100
	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGWASAN PEMERINTAH DESA	8.400.000	6.300.000	75,00	100	100	100
	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pengawasan Pemerintah Desa	8.400.000	6.300.000	75,00	100	100	100
	Terlaksananya Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pengawasan Pemerintah Desa						
	<i>Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>						
	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>	4.200.000	3.400.000	80,95	7 Dok	7 Dok	100
	<i>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Asset Desa</i>						

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN WAIBLAMA TAHUN 2025

	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	4.200.000	2.900.000	69,05	7 Dok	7 Dok	100
	TOTAL ANGGARAN	1.549.398.925	1.430.444.520	92,32	100	100	100

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut sampai dengan triwulan ke empat tahun anggaran 2025

1. Realisasi pelaksanaan anggaran sebesar 92,32 %
2. Pencapaian indikator sasaran strategis mencapai target 100 %
3. Capaian kinerja mencapai target 100 %

**BAB IV
PENUTUP****1. Kesimpulan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Waiblama Tahun 2025 bermakna strategis dalam perjalanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang secara normatif merupakan kewajiban Camat untuk menyampaikan segala bentuk penyelenggaraan program dan kegiatan baik yang termasuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2025 maupun kerjasama lintas sektor dan antar Organisasi Perangkat Daerah.

Pemerintah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara periodik, dengan demikian laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kecamatan Waiblama secara berjenjang dalam kaitan dengan semangat Reformasi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan sesuai Rencana Strategis 2024 -2026 dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

Dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja Kecamatan Waiblama Tahun 2025 dapat dinyatakan berhasil dengan sangat memuaskan sebab rata-rata capaian sasaran terwujudnya tujuan dan sasaran tersedianya sarana dan prasarana, tersedianya sistem informasi pelayanan publik, tersedianya mekanisme konsultasi, pengaduan dan adanya inovasi pelayanan publik (Renstra 2024-2026), Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan dan Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah (Renstra 2025-2029), yang dijalan melalui kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Sosial Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat, serta Pelaksanaan Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik mencapai 100%.

Masih banyak program dan kegiatan tidak dapat dilaksanakan untuk memperoleh capaian kinerja sesuai target capaian pada tahun 2025 dan kendala yang dialami diantaranya :

Kendala Khusus:

1. Tingkat koordinasi lintas sektor di kecamatan untuk melaksanakan lomba inovasi masih.
2. Aparatur khusus pelayanan publik Aparatur di kecamatan tidak memiliki pendidikan, ketrampilan, dan pengalaman khusus tentang pelayanan publik.
3. Minimnya Sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik, seperti kualitas dan kuantitas sarana pendukung kurang memadai, peralatan komputer yang kurang dan kondisi gedung kantor yang kurang memadai dan jaringan internet yang kurang baik

4. Penanganan Pengaduan Lemah: Minimnya respons terhadap keluhan, saran, dan masukan masyarakat.
5. Kurang reponsivitas : Aparatur sering kali kurang tanggap dalam menyelesaikan pelayanan sesuai standar waktu (SOP).
6. Kurangnya Informasi : Informasi mengenai persyaratan dan prosedur pelayanan tidak tersebar luas kepada masyarakat

Kendala Umum

1. Kondisi topografi yang sulit;
2. Minimnya kesadaran aparatur desa untuk mengirim data ke kecamatan
3. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan mekanisme pengaduan dan konsultasi.
4. Kendala teknis infrastruktur: akses jalan desa dan kabupaten yang belum memadai, jaringan internet buruk, dan sering terjadi pemadaman listrik
5. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap perubahan

2. Saran

Terhadap masalah di atas maka hal-hal yang perlu dilakukan sebagai berikut :

1. Peningkatan jaringan internet dan listrik;
2. Peningkatan fasilitas sarana prasarana pendukung kegiatan pelayanan publik;
3. Peningkatan koordinasi lintas sektor dan OPD terkait;
4. Peningkatan akses jalan desa yang ada;
5. Agar terus dilakukan sosialisasi Program-program Daerah, Propinsi dan Pusat ke tingkat desa.

Tanarawa, 26 Januari 2026

CAMAT WAIBLAMA



FRANSISKUS ISMAEL, SE

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19760915 200212 1 008

LAMPPIRAN



**DOKUMEN
PERJANJIAN KINERJA
(PK)
PERUBAHAN**

**KECAMATAN WAIBLAMA
TAHUN 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2025
MAUMERE**



PERJANJIAN KINERJA KERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FRANSISKUS ISMAEL,SE

Jabatan : Camat Waiblama

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : JUVENTUS YORIS PRIMA KAGO,SH

Jabatan : Bupati Sikka

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Bupati Sikka

JUVENTUS YORIS PRIMA KAGO,SH

Maumere, 03 Nopember 2025

Pihak Pertama
Camat Waiblama

FRANSISKUS ISMAEL,SE
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19760915 200212 1 008

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN WAIBLAMA**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik yang responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat		Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	2,60
		Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks	76,71
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	78,80
NO	PROGRAM			ANGGARAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			1.472.561.025	APBD II
2	Program Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			58.589.400	APBD II
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			2.450.000	APBD II
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum			7.398.500	APBD II
5	Program Pembinaan dan Pegawasan Pemerintah Desa			8.400.000	APBD II
	JUMLAH ANGGARAN			1.549.398.925	

Maumere, 03 Nopember 2025

Pihak Kedua
Bupati Sikka

JUVENTIUS YORIS PRIMA KAGO

Pihak Pertama
Camat Waiblama

FRANSISKUS ISMAEL, SE
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19760915 200212 1 008

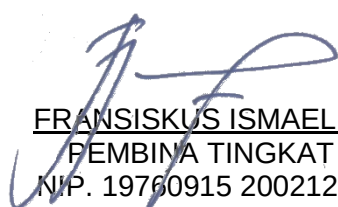
**RINCIAN LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN WAIBLAMA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.472.561.025	APBD II
2.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat		9 Laporan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.800.000	APBD II
			10 Laporan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi keuangan di Kecamatan	1.234.888.720	APBD II
			4 Paket	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan	25.849.000	APBD II
			65 Unit	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.737.300	APBD II
			12 Bulan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.363.092	APBD II
			13 Unit	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.282.913	APBD II
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	58.589.400	APBD II
			12 Laporan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	51.776.900	APBD II
			1 Laporan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	6.812.500	APBD II

	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2.450.000	APBD II
		1 Laporan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.450.000	APBD II
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.398.500	APBD II
		1 Dokumen	Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.398.500	APBD II
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.400.000	APBD II
		14 Dokumen/ 7 Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.400.000	APBD II
JUMLAH ANGGARAN					1.549.398.925	

Maumere, 03 Nopember 2025

Camat Waiblama


FRANSISKUS ISMAEL,SE

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19760915 200212 1 008



PERJANJIAN KINERJA KERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALFRIDUS YOSEF SUDARSO,S.Sos.

Jabatan : Sekretaris Kecamatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : FRANSISKUS ISMAEL,SE

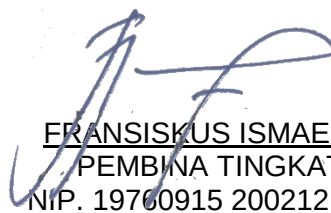
Jabatan : Camat Waiblama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Camat Waiblama


FRANSISKUS ISMAEL,SE
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19760915 200212 1 008

Maumere, 03 Nopember 2025

Pihak Pertama
Sekretaris Kecamatan

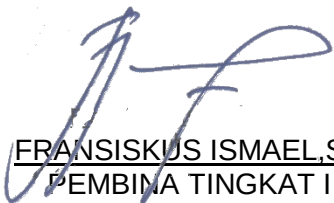

ALFRIDUS YOSEF SUDARSO,S.Sos.
PEMBINA
NIP. 19720812 199303 1 007

**RINCIAN LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KECAMATAN WAIBLAMA TAHUN 2025**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik yang responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat		Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	2,60
		Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks	76,71
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	78,80
NO	PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		ANGGARAN
KECAMATAN WAIBLAMA					
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		1.472.561.025
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7.800.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi keuangan di Kecamatan		1.234.888.720
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan		25.849.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		45.737.300
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		37.363.092
	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		121.282.913
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		58.589.400
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan		51.776.900
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat		6.812.500
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		2.450.000

	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	2.450.000
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.398.500
	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	7.398.500
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.400.000
	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	8.400.000
	JUMLAH ANGGARAN		1.549.398.925

Pihak Kedua
Camat Waiblama


FRANSISKUS ISMAEL, SE
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19760915 200212 1 008

Maumere, 03 Nopember 2025

Pihak Pertama
Sekretaris Kecamatan


ALFRIDUS YOSEF SUDARSO, S.Sos.
PEMBINA
NIP. 19720812 199303 1 007

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKRETARIS KECAMATAN**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan kewilayahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.472.561.025	APBD II
		<i>Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>9 Laporan</i>	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>7.800.000</i>	<i>APBD II</i>
		<i>Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi keuangan di Kecamatan</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>1.234.888.720</i>	<i>APBD II</i>
		<i>Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan</i>	<i>4 Paket</i>	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>25.849.000</i>	<i>APBD II</i>
		<i>Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>65 Unit</i>	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>45.737.300</i>	<i>APBD II</i>
		<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>37.363.092</i>	<i>APBD II</i>
		<i>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>13 Unit</i>	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>121.282.913</i>	<i>APBD II</i>

Maukere, 03 Nopember 2025

Pihak Kedua
Camat Waiblama

FRANSISKUS ISMAEL, SE
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19760915 200212 1 008

Pihak Pertama
Sekretaris Kecamatan

ALFRIDUS YOSEF SUDARSO, S.Sos.
PEMBINA
NIP. 19720812 199303 1 007



PERJANJIAN KINERJA KERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROBERT EDUARD HANAS, SE
Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

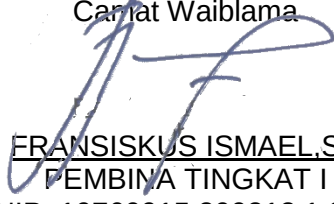
Nama : FRANSISKUS ISMAEL, SE
Jabatan : Camat Waiblama
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Maumere, 03 Nopember 2025

Pihak Kedua
Camat Waiblama


FRANSISKUS ISMAEL, SE
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19760915 200212 1 008

Pihak Pertama
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

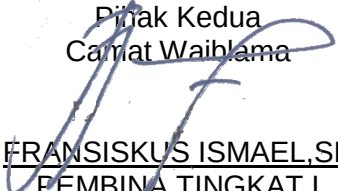

ROBERT EDUARD HANAS, SE
PENATA TINGKAT I
NIP. 19700527 200212 1 006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KECAMATAN WAIBLAMA

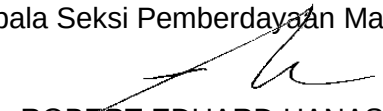
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2.450.000	APBD II
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.450.000	APBD II
NO	KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	
1	Terlaksanannya koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan		Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat		7 Desa/ 1 Kegiatan	
2	Terlaksananya fasilitasi kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan		Jumlah desa yang di fasilitasi kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan		7 Desa	
3	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan organisasi, kelompok masyarakat dan lembaga pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan		Jumlah desa yang dilaksanakan pembinaan dan pengawasan organisasi, kelompok masyarakat dan lembaga pemberdayaan masyarakat		7 Desa	
4	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan lembaga adat		Jumlah monitoring dan evaluasi kegiatan lembaga adat		7 Desa / 7 kegiatan	
5	Terlaksananya penyusunan pelaporan hasil pelaksanaan tugas		Jumlah laporan pelaksanaan tugas yang disusun		12 Laporan	
6	Terlaksananya pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan		Jumlah pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan		100 Kegiatan	

Maumere, 03 Nopember 2025

Pihak Kedua
Camat Waiblama


FRANSISKUS ISMAEL, SE
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19760915 200212 1 008

Pihak Pertama
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat


ROBERT EDUARD HANAS, SE
 PENATA TINGKAT I
 NIP. 19700527 200212 1 006



PERJANJIAN KINERJA KERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EUGENIUS O.K. CARVALLO,S.IP
Jabatan : Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

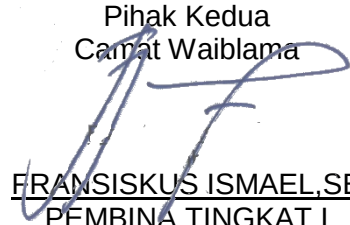
Nama : FRANSISKUS ISMAEL,SE
Jabatan : Camat Waiblama
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Maumere, 03 Nopember 2025

Pihak Kedua
Camat Waiblama


FRANSISKUS ISMAEL,SE
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19760915 200212 1 008

Pihak Pertama
Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

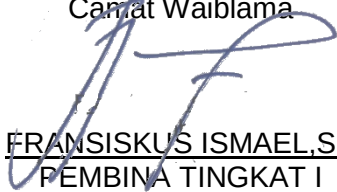

EUGENIUS O.K. CARVALLO,S.IP
PENATA TINGKAT I
NIP. 19740726 200903 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
K KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
KECAMATAN WAIBLAMA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1	Terselenggaranya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di wilayah Kecamatan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.398.500	APBD II
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.398.500	APBD II
NO	KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			TARGET
1	Terlaksananya koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/Atau TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan		Jumlah koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/Atau TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan			12 kegiatan
2	Terlaksananya koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan;		Jumlah koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan;			14 kegiatan/ 7 desa
3	Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan linmas di wilayah desa		Jumlah pelaksanaan koordinasi dan pembinaan linmas di tingkat desa			7 Desa / 14 kegiatan
4	Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan masalah sosial lainnya		Jumlah Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan masalah sosial lainnya			12 kegiatan
5	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, LSM dan lembaga profesi		Jumlah kegiatan pembinaan dan fasilitasi kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, LSM dan lembaga profesi			14 kegiatan
6	Terlaksananya koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/Atau TNI mengenai penyelenggaraan HUT RI Tingkat Kecamatan		Terlaksananya koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/Atau TNI mengenai penyelenggaraan HUT RI Tingkat Kecamatan			4 Kegiatan

7.	Terlaksananya penyusunan pelaporan hasil pelaksanaan tugas	Jumlah laporan pelaksanaan tugas yang disusun	12 Laporan
8.	Terlaksananya pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan	Jumlah pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan	100 Kali

Pihak Kedua
Camat Waiblama


FRANSISKUS ISMAEL, SE
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19760915 200212 1 008

Maumere, 03 Nopember 2025

Pihak Pertama
Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban


EUGENIUS O.K. CARVALLO, S.IP
PENATA TINGKAT I
NIP. 19740726 200903 1 002



PERJANJIAN KINERJA KERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KORNELIS IGO NAMA,S.M.

Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

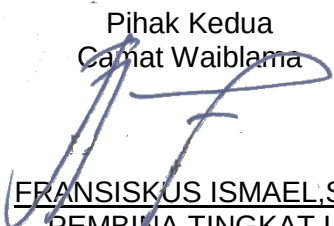
Nama : FRANSISKUS ISMAEL,SE

Jabatan : Camat Waiblama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

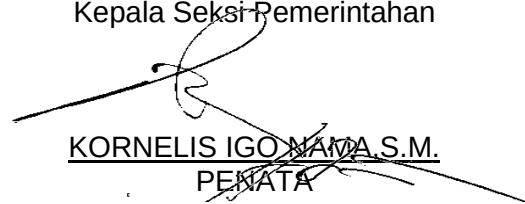
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Camat Waiblama

FRANSISKUS ISMAEL,SE
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19760915 200212 1 008

Maumere, 03 Nopember 2025

Pihak Pertama
Kepala Seksi Pemerintahan


KORNELIS IGO NAMA,S.M.
PENATA
NIP. 19800729 200901 1 006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
KECAMATAN WAIBLAMA

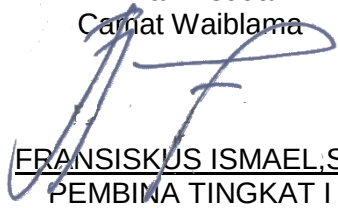
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1	<i>Terselenggaranya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.400.000	APBD II
		<i>Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>	<i>14 Dokumen</i>	<i>Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>	<i>4.200.000</i>	<i>APBD II</i>
2.	<i>Terselenggaranya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	<i>14 Dokumen</i>	<i>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	<i>4.200.000</i>	<i>APBD II</i>
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	45.205.300	APBD II
3.	<i>Terselenggaranya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>	<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>	<i>38.392.800</i>	<i>APBD II</i>
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	6.812.500	APBD II
4.	<i>Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	<i>6.812.500</i>	<i>APBD II</i>

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2025	Jumlah dokumen Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2025 yang telah di monitoring dan dievaluasi	14 Dokumen/ 7 Desa
2	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPdes Perubahan Tanun 2025 dan RKPdesT.A 2026)	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa ((RKPdes Perubahan Tanun 2025 dan RKPdesT.A 2026) yang telah di monitoring dan evaluasi	14 Dokumen/ 7 Desa
3	Terlaksananya Rapat Koordinasi tingkat kecamatan dengan seluruh Desa di Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan yang telah dilaksanakan di Kecamatan	14 Kali
4	Terlaksananya bimbingan,fasilitasi dan konsultasi tentang administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang telah diberikan bimbingan fasilitasi dan konsultasi tentang administrasi pemerintahan desa	14 kali/ 7 Desa
5	Terlaksananya pendampingan pengelolaan Keuangan Desa dan Asset Desa	Jumlah pendampingan pengelolaan Keuangan Desa dan Asset Desa	14 Kali/ 7 Desa
6	Terlaksananya konsultasi dokumen administrasi BPD antar waktu	Jumlah dokumen administrasi BPD antar waktu yang dikonsultasi	1 dokumen
7.	Terlaksananya pelantikan BPD Antar Waktu	Jumlah desa yang dilantik BPD Antar Waktu	1 Desa
8.	Terlaksananya fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah desa yang telah difasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	14 Kali/ 7 Desa
9.	Terlaksananya kegiatan pembinaan kepada BPD	Jumlah kegiatan pembinaan BPD yang telah dilaksanakan	7 Kali/ 7 Desa
10.	Terlaksananya kegiatan pembinaan kepada Kepala Desa bersama perangkat desa	Jumlah kegiatan pembinaan Kepala Desa bersama perangkat desa yang telah dilaksanakan	7 Kali/ 7 Desa
11.	Terselenggaranya persiapan dan pelaksanaan HUT RI di Tingkat kecamatan	Jumlah kegiatan persiapan dan pelaksanaan HUT RI di Tingkat kecamatan	50 Kegiatan

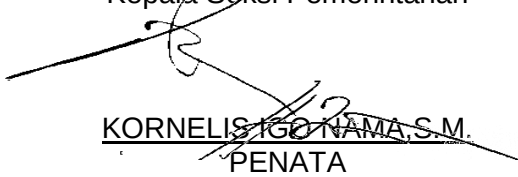
12.	Terlaksananya konsultasi administrasi penjabat kepala desa	Jumlah administrasi penjabat kepala desa yang dikonsultasi	2 Dok
13.	Terlaksananya pelantikan penjabat kepala desa	Jumlah desa yang dilantik penjabat kepala desa	2 Desa
14.	Terlaksananya pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan	Jumlah pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan	50 Kali

Maumere, 03 Nopember 2025

Pihak Kedua
Camat Waiblama


FRANSISKUS ISMAEL, SE
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19760915 200212 1 008

Pihak Pertama
Kepala Seksi Pemerintahan


KORNELIS IGO NANA S.M.
PENATA
NIP. 19740726 200903 1 002



PERJANJIAN KINERJA KERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IGNASIUS NONG SEDIS,A.M.d.

Jabatan : Kepala Seksi Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : FRANSISKUS ISMAEL,SE

Jabatan : Camat Waiblama

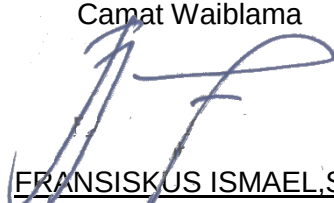
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

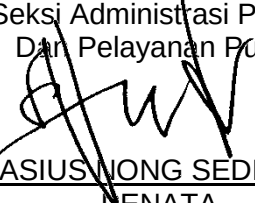
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Maumere, 03 Nopember 2025

Pihak Kedua
Camat Waiblama


FRANSISKUS ISMAEL,SE
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19760915 200212 1 008

Pihak Pertama
Kepala Seksi Administrasi Pembangunan
Dan Pelayanan Publik


IGNASIUS NONG SEDIS,A.M.d.
PENATA
NIP. 19830918 201001 1 025

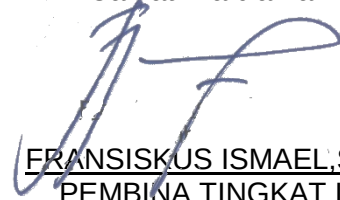
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA SEKSI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN PUBLIK
KECAMATAN WAIBLAMA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1	Terselenggaranya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	38.392.800	APBD II
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan dengan perangkat daerah dan Instansi Vertikal terkait	38.392.800	APBD II
NO	KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	
1	Terlaksanannya kegiatan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Kecamatan		Jumlah Kegiatan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Kecamatan		1 Kegiatan	
2	Terlaksanannya pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa		Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa		14 kegiatan	
3	Terlaksanannya koordinasi dengan perangkat daerah, instansi vertikal dan swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum		Jumlah kegiatan koordinasi dengan perangkat daerah, instansi vertikal dan swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum		12 kegiatan	
4	Terlaksanannya pemberian rekomendasi dan perizinan kepada masyarakat		Jumlah pemberian rekomendasi dan perizinan kepada masyarakat		40 Surat	
5	Terlaksanannya kegiatan legalitas pelayanan administrasi kependudukan		Jumlah legalitas pelayanan administrasi kependudukan		400 surat	
6	Terlaksanannya penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat		Jumlah penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat		12 laporan	
7	Terlaksananya penyusunan laporan kependudukan		Jumlah laporan kependudukan yang dibuat		12 laporan	

8	Terlaksanannya monitoring, Evaluasi dan pendataan kegiatan pembangunan di desa	Jumlah monitoring, evaluasi dan pendataan kegiatan pembangunan di desa	7 desa
9	Terlaksanannya fasilitasi penyelenggaraan musrenbangdes/Musdes tingkat desa dan kecamatan	Jumlah desa yang difasilitasi penyelenggaraan Musrenbangdes/Musdes	7 Desa
10	Terlaksanannya pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan	Jumlah pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan	50 Kali

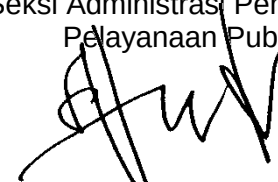
Maumere, 03 Nopember 2025

Pihak Kedua
Camat Waiblama



FRANSISKUS ISMAEL, SE
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19760915 200212 1 008

Pihak Pertama
Kepala Seksi Administrasi Pembangunan dan
Pelayanan Publik



IGNASIUS NONG SEDIS, A.M.d.
PENATA
NIP. 19830918 201001 1 025



PERJANJIAN KINERJA KERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MIKAEL MIPIN
Jabatan : Kepala Seksi Sosial dan Ekonomi
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

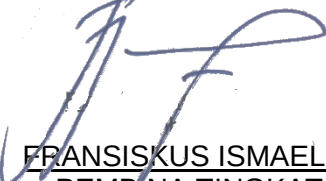
Nama : FRANSISKUS ISMAEL,SE
Jabatan : Camat Waiblama
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Maumere, 03 Nopember 2025

Pihak Kedua
Camat Waiblama


FRANSISKUS ISMAEL,SE
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19760915 200212 1 008

Pihak Pertama
Kepala Seksi Sosial dan Ekonomi

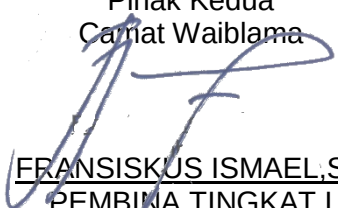

MIKAEL MIPIN
PENATA MUDA TK.I
NIP. 19771007 200112 1 004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA SEKSI SOSIAL DAN EKONOMI
KECAMATAN WAIBLAMA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1	<i>Terselenggaranya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	51.768.900	APBD II
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan dengan perangkat daerah dan Instansi Vertikal terkait	38.392.800	APBD II
2.	<i>Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>13.384.100</i>	<i>APBD II</i>
NO	KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			TARGET
1	Terlaksananya koordinasi penyaluran Bantuan Sosial Bagi Masyarakat		Jumlah koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial Bagi Masyarakat yang telah dilaksanakan			14 Kali
2	Terlaksananya koordinasi Pemanfaatan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah Koordinasi pemanfaatan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang telah dilaksanakan			14 Kali
3	Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan di Kecamatan		Jumlah koordinasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan di Kecamatan yang telah dilaksanakan			14 Kali

4	Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kesehatan masyarakat di kecamatan	Jumlah koordinasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kesehatan masyarakat di kecamatan yang telah dilaksanakan	14 Kali
5	Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan di kecamatan	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina	7 Organisasi
6	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi produktif	Jumlah pengembangan usaha ekonomi produktif yang dibina	10 Kelompok
7	Terlaksananya penyusunan pelaporan hasil pelaksanaan tugas	Jumlah laporan pelaksanaan tugas yang disusun	12 Laporan
8	Terlaksananya pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan	Jumlah pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan	50 Kali

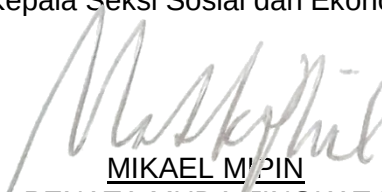
Pihak Kedua
Camat Waiblama



FRANSISKUS ISMAEL, SE
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19760915 200212 1 008

Maumere, 03 Nopember 2025

Pihak Pertama
Kepala Seksi Sosial dan Ekonomi



MIKAEL M. PIN
PENATA MUDA TINGKAT I
NIP. 19771007 200112 1 004



PERJANJIAN KINERJA KERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FRANSISKUS PETRUS POEANG,SP

Jabatan : Kepala Sub. Bagian Program,Evaluasi dan Pelaporan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ALFRIDUS YOSEF SUDARSO,S.Sos.

Jabatan : Sekretaris Kecamatan

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Maumere, 03 Nopember 2025

Pihak Kedua
Sekretaris Kecamatan,

ALFRIDUS YOSEF SUDARSO,S.Sos

PEMBINA

NIP. 19720812 199303 1 007

Pihak Pertama
Kasubag. Program, Evaluasi dan
Pelaporan

FRANSISKUS PETRUS POEANG,SP

PENATA TINGKAT I

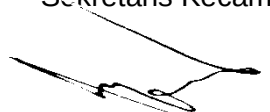
NIP. 19810910 201101 1 009

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KASUBAG. PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN
KECAMATAN WAIBLAMA

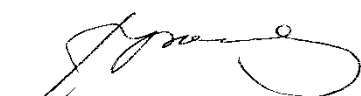
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1	Mewujudkan kinerja yang efektif, efisien, dan akuntabel melalui dokumen perencanaan terintegrasi	Terlaksana Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.800.000	APBD II
		<i>Jumlah Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>9 Laporan</i>	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>7.800.000</i>	<i>APBD II</i>

Maumere, 03 Nopember 2025

Pihak Kedua
Sekretaris Kecamatan


ALFRIDUS YOSEF SUDARSO, S.Sos.
 PEMBINA
 NIP. 19720812 199303 1 007

Pihak Pertama
Kasubag. Program, Evaluasi dan Pelaporan


FRANSISKUS PETRUS POEANG, SP
 PENATA TINGKAT I
 NIP. 19810910 201101 1 009



PERJANJIAN KINERJA KERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RUSNADI RUS

Jabatan : Kepala Sub. Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Asset

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ALFRIDUS YOSEF SUDARSO, S.Sos.

Jabatan : Sekretaris Kecamatan

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Maumere, 03 Nopember 2025

Pihak Kedua
Sekretaris Kecamatan


ALFRIDUS YOSEP SUDARSO, S.Sos
PEMBINA
NIP. 19720812 199303 1 007

Pihak Pertama
Kasubag. Kepegawaian, Keuangan
dan Asset


RUSNADI RUS
PENATA MUDA
NIP. 19770325 200604 1 011

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KASUBAG. KEPEGAWAIAN, KEUANGAN DAN ASET
KECAMATAN WAIBLAMA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan kewilayahan	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi keuangan di Kecamatan	12 Bulan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.234.888.720	APBD II
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>15 Orang 14 Bulan</i>	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>1.197.440.720</i>	<i>APBD II</i>
		<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>37.448.000</i>	<i>APBD II</i>
		Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Umum di Kecamatan	12 Bulan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	25.489.000	APBD II
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	<i>1 Paket</i>	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>1.213.800</i>	<i>APBD II</i>
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	<i>4 Paket</i>	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>8.932.700</i>	<i>APBD II</i>
		<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	<i>1 Paket</i>	<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	<i>2.962.500</i>	<i>APBD II</i>
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>55 Laporan</i>	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>12.380.000</i>	<i>APBD II</i>
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65 Unit	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.737.300	APBD II
		<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	<i>58 Unit</i>	<i>Pengadaan Mebel</i>	<i>19.597.400</i>	<i>APBD II</i>

		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.139.900	APBD II
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.363.092	APBD II
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.352.704	APBD II
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31.010.388	APBD II
		Terpeliharanya barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13 Unit	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	121.282.913	APBD II
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional atau lapangan	89.142.713	APBD II
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.800.000	APBD II
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.340.200	APBD II

Maumere, 03 Nopember 2025

Pihak Kedua
Sekretaris Kecamatan


ALFRIDUS YOSEF SUDARSO, S.Sos.
PEMBINA
NIP. 19720812 199303 1 007

Pihak Pertama
Kasubag. Kepegawaian, Keuangan dan Asset


RUSNADI RUS
PENATA MUDA
NIP. 19770325 200604 1 011



PERJANJIAN KINERJA KERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YOSEPH MA OU
Jabatan : Pengadministrasian Perkantoran
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

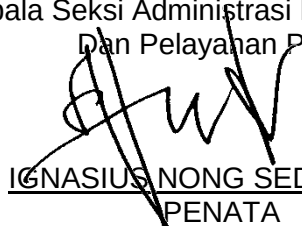
Nama : IGNASIUS NONG SEDIS,A.M.d.
Jabatan : Kepala Seksi Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

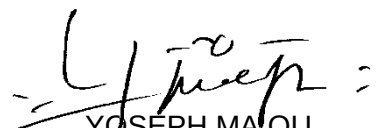
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Maumere, 03 Nopember 2025

Pihak Kedua
Kepala Seksi Administrasi Pembangunan
Dan Pelayanan Publik


IGNASIUS NONG SEDIS,A.M.d.
PENATA
NIP. 19830918 201001 1 025

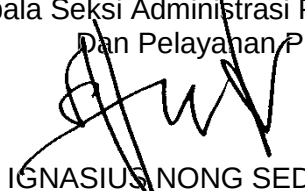
Pihak Pertama
Pengadministrasia Perkantoran


YOSEPH MA'OU
PENATA MUDA
NIP. 19720719 2008011 007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
PENGADMINISTRASIAN PERKANTORAN (Seksi Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik)
KECAMATAN WAIBALAMA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET
1	Terlaksananya pengarsipan surat - menyurat di seksi Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik	Jumlah pengarsipan surat - menyurat di Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik	100 Surat
2	Terlaksananya pengumpulan data Kependudukan	Jumlah pengumpulan data kependudukan yang dilaksanakan	84 Data/ 7 Desa/12 Bulan
3	Terlaksananya penyusunan laporan data kependudukan	Jumlah laporan data kependudukan yang dibuat	12 Laporan
4	Terlaksananya pengumpulan data kegiatan pembangunan di Kecamatan	Jumlah pengumpulan data kegiatan pembangunan yang dibuat	20 Data
5	Terlaksananya pengumpulan data hasil kegiatan Musrengbangdes/Musdes	Jumlah pengumpulan data hasil kegiatan Musrengbangdes/Musdes	7 Desa
6	Terlaksananya administrasi rekomendasi dan perizinan kepada masyarakat	Jumlah administrasi rekomendasi dan perizinan kepada masyarakat yang dibuat	40 Surat
7	Terlaksananya administrasi legalitas pelayanan administrasi kependudukan	Jumlah administrasi legalitas pelayanan administrasi kependudukan yang dilayani	400 Surat
8	Terlaksananya penyusunan pelaporan hasil pelaksanaan tugas	Jumlah laporan pelaksanaan tugas yang disusun	12 Laporan
9	Terlaksananya pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan	Jumlah pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan	50 Kali

Pihak Kedua
Kepala Seksi Administrasi Pembangunan
Dan Pelayanan Publik


IGNASIUS NONG SEDIS, A.M.d.
 PENATA
 NIP. 19830918 201001 1 025

Maumere, 03 Nopember 2025
Pihak Pertama
Pengadministrasian Perkantoran


YOSEPH MA OU
 PENATA MUDA
 NIP. 19720719 2008011 007



PERJANJIAN KINERJA KERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

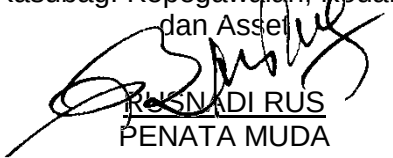
Nama : ANSELMUS DEGO,A.M.d.
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

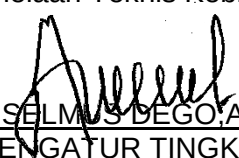
Nama : RUSNADI RUS
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Asset
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Maumere, 03 Nopember 2025

Pihak Kedua
Kasubag. Kepegawaian, Keuangan
dan Asset

RUSNADI RUS
PENATA MUDA
NIP. 19770325 200604 1 011

Pihak Pertama
Penelaah Teknis Kebijakan

ANSELMUS DEGO,A.M.d.
PENGATUR TINGKAT I
NIP. 19870512 202012 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
KECAMATAN WAIBLAMA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET
1	Terlaksananya penyusunan bahan/rancangan penelaahan kebijakan teknis di tingkat kecamatan	Jumlah laporan penelaahan teknis kebijakan	10 Dokumen
2	Terlaksanya pengelolaan data dan informasi kebijakan	Persentase data kebijakan yang valid dan ter-update secara berkala	90 %
3	Terlaksananya dukungan administrasi teknis	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di desa/kelurahan	12 Laporan
4	Tersusunnya bahan koordinasi antar instansi/sector	Jumlah naskah dinas/bahan koordinasi yang disusun tepat waktu	10 Laporan
5	Terlaksananya pelaksanaan tugas kedinasan lain (tugas tambahan) yang diberikan oleh atasan	Jumlah pelaksanaan tugas kedinasan lain (tugas tambahan) yang diberikan oleh atasan	100 Kegiatan
6	Terlaksananya penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas yang disusun	12 laporan

Maumere, 03 Nopember 2025

Pihak Kedua
Kasubag. Kepegawaian, Keuangan dan Asset


RUSNADI RUS
PENATA MUDA
NIP. 19770325 200604 1 011

Pihak Pertama
Penelaah Teknis Kebijakan


ANSELMUS DEGO, A.M.d.
PENGATUR TINGKAT I
NIP. 19870512 202012 1 001



PERJANJIAN KINERJA KERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : THERESIA TOA
Jabatan : Pengadministrasian Persuratan
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

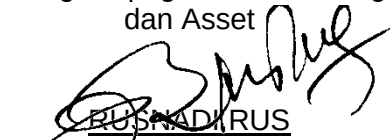
Nama : RUSNADI RUS
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Asset
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Maumere, 03 Nopember 2025

Pihak Kedua
Kasubag. Kepegawaian, Keuangan
dan Asset


RUSNADI RUS
PENATA MUDA
NIP. 19770325 200604 1 011

Pihak Pertama
Pengadministrasian Persuratan


THERESIA TOA
PENGATUR
NIP. 19821111 200801 2 025

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
PENGADMINISTRASIAN PERSURATAN
KECAMATAN WAIBLAMA**

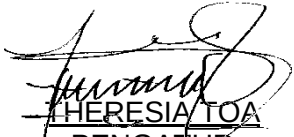
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET
1	Terlaksananya penerimaan, pencatatan dan pengagendaan surat keluar dan masuk	Jumlah penerimaan, pencatatan dan pengagendaan surat keluar dan masuk	150 Surat
2	Terlaksananya pendistribusian surat keluar	Jumlah pendistribusian surat keluar	100 Surat
3	Terlaksananya pendistribusian surat masuk berdasar disposisi pimpinan	Jumlah pendistribusian surat masuk berdasar disposisi pimpinan	100 Surat
4	Terlaksananya penyusunan pelaporan hasil pelaksanaan tugas	Jumlah penyusunan laporan pelaksanaan tugas yang	12 Laporan
5	Terlaksananya pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan	Jumlah pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan	50 Kali

Maukere, 03 Nopember 2025

Pihak Kedua
Kasubag. Kepegawaian, Keuangan dan Asset


RUSNADI RUS
PENATA MUDA
 NIP. 19770325 200604 1 011

Pihak Pertama
Pengadministrasian Persuratan


THERESIA TOA
PENGATUR
 NIP. 19821111 200801 2 025



PERJANJIAN KINERJA KERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARKUS MAJU
Jabatan : Pengadministrasian Perkantoran
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

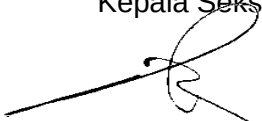
Nama : KORNELIS IGO NAMA,S.M.
Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Maumere, 03 Nopember 2025

Pihak Kedua
Kepala Seksi Pemerintahan


KORNELIS IGO NAMA, S.M.
PENATA
NIP. 19800729 200901 1 005

Pihak Pertama
Pengadministrasian Perkantoran


MARKUS MAJU
PENGATUR MUDA TK. I
NIP. 19741002 201001 1 002

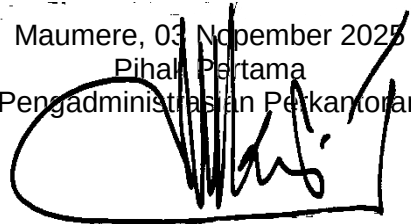
**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
PENGADMINISTRASIAN PERKANTORAN (SEKSI PEMERINTAHAN)
KECAMATAN WAIBLAMA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET
1	Terlaksananya pelayanan administrasi persuratan dan administrasi lainnya dibidang pemerintahan	Jumlah pelayanan administrasi persuratan dan administrasi lainnya dibidang pemerintahan	150 Surat
2	Terlaksananya pengarsipkan surat dan dokumen lainnya,	Jumlah pelaksanaan pengarsipkan surat dan dokumen lainnya	200 surat/Dok.
3	Terlaksananya pencatatan surat masuk/keluar dan dokumen lainnya dibidang pemerintahan	Jumlah pencatatan surat masuk/keluar dan dokumen lainnya dibidang pemerintahan	200 Surat
4	Terlaksananya penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku	Jumlah bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa yang disiapkan	28 Dokumen
5	Terlaksananya penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas	Jumlah laporan pelaksanaan tugas yang yang disusun	12 Laporan
6	Terlaksananya pelaksanaan tugas kedinasan lain (tugas tambahan) yang diberikan oleh atasan	Jumlah pelaksanaan tugas kedinasan lain (tugas tambahan) yang diberikan oleh atasan	50 Kali

Pihak Kedua
Kepala Seksi Pemerintahan


KORNELIS IGO NAMA S.M.
PENATA
NIP. 19800729 200901 1 005

Maumere, 03 Nopember 2025
Pihak Pertama
Pengadministrasian Perkantoran


MARKUS MAJU
PENGATUR MUDA TK. I
NIP. 19741002 201001 1 002



PERJANJIAN KINERJA KERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANASTASIA YOSEFRI HAKI MEIN,S.Sos.

Jabatan : Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : RUSNADI RUS

Jabatan : Kepala Sub. Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Asset

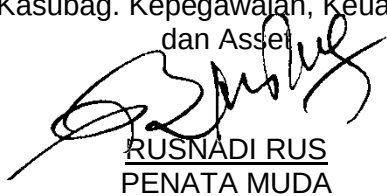
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Maumere, 03 Nopember 2025

Pihak Kedua
Kasubag. Kepegawaian, Keuangan
dan Asset



RUSNADI RUS
PENATA MUDA

NIP. 19770325 200604 1 011

Pihak Pertama
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur



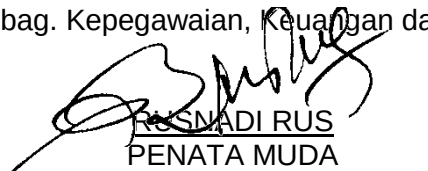
ANASTASIA YOSEFRI HAKI MEIN,S.Sos
NIP. 19870319 202312 2 038

LAMPIRAN PERUBAHAN TAHUN 2025
ANALISIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
KECAMATAN WAIBLAMA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET
1	Terlaksananya penyusunan rencana bahan kerja sub bagian kepegawaian berdasarkan program kerja kecamatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas	Jumlah penyusunan rencana bahan kerja sub bagian kepegawaian yang di laksanakan	25 Berkas
2	Terlaksananya persiapan berkas usulan kenaikan pangkat bagi fungsioanal umum, DUK, kenaikan gaji berkala, administrasi pensiun, Daftar Nominatif pegawai, cuti ASN, usulan diklat penjurangan dan fungsional	Jumlah persiapan berkas usulan kenaikan pangkat bagi fungsioanal umum, DUK, kenaikan gaji berkala, administrasi pensiun, Daftar Nominatif pegawai, cuti ASN, usulan diklat penjurangan dan fungsional yang diselesaikan	25 Berkas
3	Terlaksananya perekapan daftar hadir ASN yang sudah dikoreksi atasan dan diserahkan ke bendahara gaji sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian TPP ASN	Jumlah perekapan daftar hadir ASN yang sudah dikoreksi atasan dan diserahkan ke bendahara gaji sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian TPP ASN	12 Dokumen
3	Terlaksananya perekapan daftar hadir ASN	Jumlah perekapan daftar hadir ASN yang diselesaikan	12 Dokumen
4	Terlaksananya penyimpanan arsip kepegawaian secara tertib agar mudah diperlukan saat ditemukan.	Jumlah penyimpanan arsip kepegawaian secara tertib yang dilaksanakan	14 Dokumen
5	Terlaksananya penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan yang diselesaikan	12 Laporan

6	Terlaksananya pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan	Jumlah pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan	20 Kegiatan
---	---	--	-------------

Pihak Kedua
Kasubag. Kepegawaian, Keuangan dan Asset


RUSNADI RUS
PENATA MUDA
NIP. 19770325 200604 1 011

Maumere, 03 Nopember 2025
Pihak Pertama
Analisis Sumber Daya Aparatur


ANASTASIA YOSEFRI HAKI MEIN, S.Sos
NIP. 19870319 202312 2 038



PERJANJIAN KINERJA KERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BERKHMANS JEK
Jabatan : Pengadministrasian Perkantoran
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : RUSNADI RUS
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Asset
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Maumere, 03 Nopember 2025

Pihak Kedua
Kasubag. Kepegawaian, Keuangan
dan Asset



RUSNADI RUS
PENATA MUDA
NIP. 19770325 200604 1 011

Pihak Pertama
Pengadministrasian Perkantoran



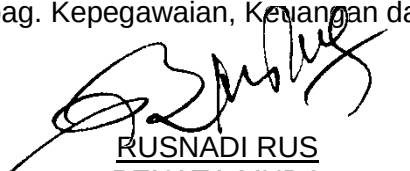
BERKHMANS JEK
NIP. 198701012025211077

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
PENGADMINISTRASIAN PERKANTORAN
KECAMATAN WAIBLAMA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET
1	Terlaksananya penerimaan, pencatatan dan pengagendaan surat keluar dan masuk	Jumlah penerimaan, pencatatan dan pengagendaan surat keluar dan masuk	50 Surat
2	Terlaksananya pendistribusian surat keluar	Jumlah pendistribusian surat keluar	100 Surat
3	Terlaksananya pendistribusian surat masuk berdasrkan disposisi pimpinan	Jumlah pendistribusian surat masuk berdasrkan disposisi pimpinan	100 Surat
4	Terlaksananya pengarsipan surat menyurat di sekretariat	Jumlah surat di sekretariat yang diarsipkan	100 surat
5	Terlaksananya penyelesaian administrasi keuangan dan asset	Jumlah administrasi keuangan dan asset yang diselesaikan	30 Data
6	Menyediakan ruang rapat dan akomodasi rapat	Persentase ruang dan akomodasi rapat yang disediakan	90 %
7	Terlaksananya penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas	Jumlah laporan pelaksanaan tugas yang disusun	12 Laporan
8	Terlaksananya pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan	Jumlah pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan	50 Kali

Maumere, 03 Nopember 2025

Pihak Kedua
Kasubag. Kepegawaian, Keuangan dan Asset



RUSNADI RUS
PENATA MUDA
NIP. 19770325 200604 1 011

Pihak Pertama
Pengadministrasian Perkantoran



BERKHMANS JEK
NIP. 198701012025211077



PERJANJIAN KINERJA KERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANTONIUS AFRIANUS NONG BENI

Jabatan : Pengadministrasian Perkantoran

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : RUSNADI RUS

Jabatan : Kepala Sub. Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Asset

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Maumere, 03 Nopember 2025

Pihak Kedua
Kasubag. Kepegawaian, Keuangan
dan Asset

RUSNADI RUS
PENATA MUDA
NIP. 19770325 200604 1 011

Pihak Pertama
Pengadministrasian Perkantoran

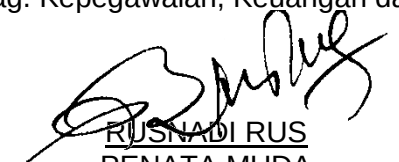
ANTONIUS AFRIANUS NONG BENI
NIP. 19860402 202521 1 042

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
PENGADMINISTRASIAN PERKANTORAN
KECAMATAN WAIBLAMA**

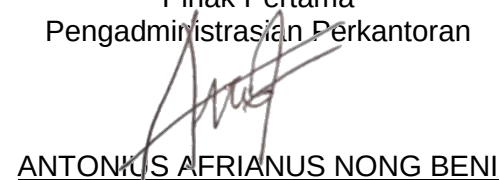
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET
1	Terlaksananya penerimaan, pencatatan dan pengagendaan surat keluar dan masuk	Jumlah penerimaan, pencatatan dan pengagendaan surat keluar dan masuk	50 Surat
2	Terlaksananya pendistribusian surat keluar	Jumlah pendistribusian surat keluar	100 Surat
3	Terlaksananya pendistribusian surat masuk berdasar disposisi pimpinan	Jumlah pendistribusian surat masuk berdasar disposisi pimpinan	100 Surat
4	Terlaksananya pengarsipan surat menyurat di sekretariat	Jumlah surat di sekretariat yang diarsipkan	100 surat
5	Terlaksananya penyelesaian administrasi dan data kepegawaian	Jumlah administrasi dan data kepegawaian yang diselesaikan	40 Data
6	Menyediakan ruang rapat dan akomodasi rapat	Persentase ruang dan akomodasi rapat yang disediakan	90 %
7	Terlaksananya penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas	Jumlah laporan pelaksanaan tugas yang disusun	12 Laporan
8	Terlaksananya pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan	Jumlah pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan	50 Kali

Maumere, 03 Nopember 2025

Pihak Kedua
Kasubag. Kepegawaian, Keuangan dan Asset


RUSNADI RUS
PENATA MUDA
NIP. 19770325 200604 1 011

Pihak Pertama
Pengadministrasian Perkantoran


ANTONIUS AFRIANUS NONG BENI
NIP. 19860402 202521 1 042

**RENCANA KINERJA TAHUNAN PERUBAHAN
KECAMATAN WAIBLAMA
TAHUN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
I		Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	2,60
1	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks	76,71
2	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	78,80

JUMLAH ANGGARAN : Rp. 1.549.398.925

Maumere, 03 Nopember 2025

CAMAT WAIBLAMA



FRANSISKUS ISMAEL, SE
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19760915 200212 1 008

**RENCANA KINERJA TAHUNAN PERUBAHAN
KECAMATAN WAIBLAMA
TAHUN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
I		Indeks Kepuasan Masyarakat di kecamatan.	Indeks	76,61
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana	Indeks Sarana dan Prasarana	Indeks	74,43
2	Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Publik	Kemudahan Akses Cepat, Akurat dan Akuntabel	%	0,43
3	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	Tersedianya SOP	%	2,00
4	Adanya Inovasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik	%	0,8

JUMLAH ANGGARAN : Rp. 1.549.398.925

Mamere, 03 Nopember 2025

SAMAT WAIBLAMA



FRANSISKUS ISMAEL, SE

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19760915 200212 1 008

POHON KINERJA KECAMATAN WAIBLAMA PERUBAHAN TAHUN 2025

Masalah Pokok

ISU/MASALAH POKOK

Belum Optimalnya Pelayanan Publik Di Kecamatan

Masalah

MASALAH

Belum Tersedianya Sarana dan Prasarana

Belum Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Publik

Belum Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan

Belum Adanya Inovasi Pelayanan Publik

Akar Masalah

AKAR MASALAH

Masih rendahnya pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) dan papan informasi untuk memperkuat informasi pelayanan publik	Masih rendahnya anggaran serta pemanfaatan program strategis pusat dan propinsi untuk meningkatkan fasilitas penunjang kecamatan	Masih rendahnya regulasi untuk mengoptimalkan fasilitas penunjang di kecamatan	Masih rendahnya SDM yang memahami TIK dan meningkatkan kesadaran aparatur Desa dalam menyediakan data yang akurat.	Belum optimalnya jaringan internet, media sosial, WEB Kecamatan untuk meningkatkan kerja sama Lintas Sektor dan Forkopimca dalam menyampaikan informasi ke publik	Masih rendahnya pemanfaatan media sosial untuk menyampaikan informasi ke ruang publik	Masih rendahnya pemanfaatan papan informasi, WEB Kecamatan dan peningkatan kesadaran Aparatur Desa dalam mengirimkan data ke kecamatan	Masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan dan konsultasi publik melalui kotak saran, media sosial dan ruang konsultasi publik	Masih rendahnya kerjasama Lintas Sektor, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Adat serta pemanfaatan SDM untuk mengoordinir konsultasi dan pengaduan	Belum menyusun SOP sebagai panduan dan membangun kerja sama Lintas Sektor, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Adat serta memanfaatkan media sosial untuk optimalisasi pelayanan publik	Masih rendahnya sumber daya aparatur, TIK, kearifan lokal, regulasi pelayanan publik melalui koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat	Masih rendahnya regulasi pelayanan publik dan TIK untuk menyusun standar pelayanan minimal dan mengoptimalkan evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor.	Masih rendahnya standar pelayanan minimal dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana, TIK, kearifan lokal, lomba inovasi, evaluasi pelayanan publik melalui kerjasama lintas sektor untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran	Masih rendahnya koordinasi aparatur kecamatan untuk melaksanakan lomba inovasi dan pembentukan BUMDes bersama
---	--	--	--	---	---	--	--	---	---	---	--	--	---

Misi

Terwujudnya Masyarakat Sikka Yang Produktif, Kreatif, Unggul dan Mandiri Menuju Maumere Baru

Tujuan

TUJUAN

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan

INDIKATOR TUJUAN

INDIKATOR TUJUAN

Indeks Kepuasan Masyarakat

SASARAN

SASARAN

Tersedianya Sarana dan Prasarana

Tersedia Sistem Pelayanan Informasi Publik

Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan

Adanya Inovasi Pelayanan Publik

INDIKATOR SASARAN

INDIKATOR SASARAN

Indeks Sarana dan Prasarana

Kemudahan akses Cepat, Akurat dan Akuntabel

Tersedianya SOP

Inovasi Pelayanan Publik

PROGRAM	PROGRAM						
Penanggung jawab	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
	SEKRETARIAT		KEPALA SEKSI				
	Kasubag. Program, Evaluasi dan Pelaporan	Kasub.Kepeg, Keuangan dan Asset	Kasie. Pemerintahan	Kasie. Pemberdayaan Masyarakat	Kasie. Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kasie. Sosial Ekonomi	Kasie. Administasi Pembangunan dan Pelayanan Publik

MAUMERE, 03 Nopember 2025

SAMAT WAIBLAMA

FRANSISKUS ISMAEL SE
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19760915 200212 1 008

	POHON KINERJA KECAMATAN WAIBLAMA PERUBAHAN TAHUN 2025				
Masalah Pokok	ISU/MASALAH POKOK				
	Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Belum Baik				
Masalah	MASALAH				
	Pelayanan Publik di Kecamatan yang belum Optimal				
Akar Masalah	AKAR MASALAH				
	Pelayana publik di setiap kecamatan belum optimal	Masih minimnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman umum	Masih terjadi ketidaksinkronan antara kelurahan atau desa, UPTD dan lembaga vertikal di kecamatan	Kapasitas aparatur pemerintah desa masih perlu ditingkatkan
Misi					
	Terwujudnya Masyarakat Sikka Yang Produktif, Kreatif, Unggul dan Mandiri Menuju Maumere Baru				
Tujuan	TUJUAN				
	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik yang responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat				
INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN				
	Indeks Kepuasan Masyarakat				
SASARAN	SASARAN				
	Meningkatnya kapasitas dan Akuntabilitas Anggaran Serta Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan			
INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR SASARAN				
	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan			
PROGRAM	PROGRAM				
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Des	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Penanggung jawab	SEKRETARIAT		KEPALA SEKSI		
	Kasubag. Program, Evaluasi dan Pelaporan	Kasub.Kepeg. Keuangan dan Asset	Kasie. Pemerintahan	Kasie. Administasi Pembangunan dan Pelayanan Publik dan Kasie.	Kasie. Pemberdayaan Masyarakat Kasie. Ketenteraman dan Ketertiban Umum

MAUMERE, 03 Nopember 2025



 CAMAT WAIBLAMA
FRANSISKUS ISMAEL, SE
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19760915 200212 1 008

CASCADING KECAMATAN WAIBLAMA PERUBAHAN TAHUN 2025

KEPALA DAERAH	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024-2026			
	TUJUAN			
E S E L O N	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan			
	INDIKATOR TUJUAN			
	Indeks Kepuasan Masyarakat			
	SASARAN			
E S E L O N I I I - B	RENSTRA KECAMATAN WAIBLAMA			
	Tersedianya Sarana dan Parasarana	Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Publik	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	Adanya Inovasi Pelayanan Publik
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Waiblama			
	INDIKATOR KINERJA SASARAN			
	Indeks Sarana dan Parasara	Kemudahan Akses Cepat, Akurat dan Akuntabel	Tersedianya SOP	Inovasi Pelayanan Publik
	SATUAN			
	Indeks	%	%	%
	TARGET			
	74,43	0,43	2,00	0,8
	e-budgeting			
E S E L O N I I I - B	SASARAN PROGRAM			
	Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah kecamatan
	INDIKATOR PROGRAM			
	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN)	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan
	SATUAN			
	%	%	%	%
	TARGET			
	100	100	100	100

E S E L O N I V	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota						Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Program Pembinaan Pengawasan Pemerintah Desa		
	Kasub Program, Evaluasi dan Pelaporan	Kasub Kepeg. Keu. dan Aset	Kasub Kepeg.Keu. dan Aset	Kasub Kepeg.Keu. dan Aset	Kasub Kepeg.Keu. dan Aset	Kasub Kepeg.Keu. dan Aset	Kasie. Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik dan Kasie. Sosial dan Ekonomi		Kasie Pemberdayaan Masyarakat	Kasie. Ketenteraman dan Keterlibatan	Kasie Pemerintahan		
	SASARAN KEGIATAN												
	Tersediannya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersediannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersediannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
	INDIKATOR KEGIATAN												
	Jumlah Laporan Cpaian Kinerja dan lktisar realisasi Kinerja SKPD yang disusun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN, Serta Honor Pengelola Keuangan	Jumlah Paket Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di sediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
	SATUAN												
	Laporan	Bulan	Paket	Paket	Bulan	Unit	Laporan	Dokumen	Laporan	Laporan	Dokumen	Dokumen	Dokumen
	7												
	9	14	4	3	12	12	12	1	1	1	1	7	7
	KEGIATAN												
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
PENANGGUNG JAWAB	SEKRETARIAT					KASIE AP3 dan SOSEK			Kasie. Pemb Masy	KASIE TRANTIB	KASIE. PEM		
ANGGARAN	7.800.000	1.234.888.720	25.489.000	45.737.300	37.363.092	121.282.913	38.392.800	13.384.100	6.812.500	2.450.000	7.398.500	4.200.000	4.200.000
1.472.561.025											76.837.900		
												1.549.398.925,00	

MAUMERE, 03 Nopember 2025



CAMAT WAIBLAMA,

FRANSISKUS ISMAEL, SE

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 197260915 200212 1 008

CASCADING KECAMATAN WAIBLAMA PERUBAHAN TAHUN 2025

KEPALA DAERAH	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025-2029					
	TUJUAN					
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan					
	INDIKATOR TUJUAN					
	Indeks Kepuasan Masyarakat					
	SASARAN					
	RENSTRA KECAMATAN WAIBLAMA					
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Waiblama					
	ESELON	INDIKATOR KINERJA SASARAN				
Nilai Sakip Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan				
SATUAN						
Angka		Indeks				
TARGET						
78,80		76,61				
e-budgeting						
SASARAN PROGRAM						
Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan kewilayahan		Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah kecamatan	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	
ESELON		INDIKATOR PROGRAM				
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN)	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan
	SATUAN					
	%		%	%	%	%
	TARGET					
	100		100	100	100	100

E S E L O N I V	PROGRAM												
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota						Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Program Pembinaan Pengawasan Pemerintah Desa	
	Kasub Program, Evaluasi dan Pelaporan	Kasub Kepeg. Keu. dan Aset	Kasub Kepeg. Keu. dan Aset	Kasub Kepeg.Keu. dan Aset	Kasub Kepeg.Keu. dan Aset	Kasub Kepeg.Keu. dan Aset	Kasie. Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik dan Kasie. Sosial dan Ekonomi			Kasie Pemberdayaan Masyarakat	Kasie. Ketenteraman dan Ketertiban	Kasie Pemerintahan	
	SASARAN KEGIATAN												
	Tersediannya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersediannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersediannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersediannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
	INDIKATOR KEGIATAN												
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD yang disusun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN, Serta Honor Pengelola Keuangan	Jumlah Paket Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di sediakan	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
	SATUAN												
	Laporan	Bulan	Paket	Paket	Bulan	Unit	Laporan	Dokumen	Laporan	Laporan	Dokumen	Dokumen	Dokumen
	TARGET												
	9	14	4	3	12	12	12	1	1	1	1	7	7
	KEGIATAN												
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
PENANGGUNGJAWA	SEKRETARIAT					KASIE AP3 dan SOSEK			Kasie. Pemb Masy	KASIE TRANTIB	KASIE. PEM		
ANGGARAN	7.800.000	1.234.888.720	25.489.000	45.737.300	37.363.092	121.282.913	38.392.800	13.384.100	6.812.500	2.450.000	7.398.500	4.200.000	4.200.000
						1.472.561.025		76.837.900					
1.549.398.925,00													

Maumere, 03 Nopember 2025

KABUPATEN WAIBLAMA,

FRANSISKUS ISMAEL, SE
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19720915 200212 1 008

RENCANA AKSI PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN WAIBLAMA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				KEGIATAN	HASIL YANG AKAN DICAPAI				ANGGARAN				JUMLAH	PENANGGUNG JAWAB
		TW 1	TW2	TW3	TW 4		TW 1	TW2	TW3	TW 4	TW 1	TW2	TW3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)				76,61					76,61						
Tersedianya Sarana dan Prasarana	Indeks Sarana dan Prasarana (Indeks)				74,43					74,43						
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)				78,35					78,35						
		4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	7.800.000	Kasubag PEP
		4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	7.800.000	
		3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	308.722.180	308.722.180	308.722.180	308.722.180	1.234.888.720	Kasubag KKA
		4 Bulan	4 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4 Bulan	4 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	299.360.180	299.360.180	299.360.180	299.360.180	1.197.440.720	
		3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	9.362.000	9.362.000	9.362.000	9.362.000	37.448.000	
		3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	5.577.600	4.363.800	4.363.800	11.183.800	25.489.000	Kasubag KKA
		1 Paket	-	-	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	-	-	-	1.213.800	-	-	-	1.213.800	
		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2.233.175	2.233.175	2.233.175	2.233.175	8.932.700	
		1.750 Lembar/ 4 Buku	1.750 Lembar/ 4 Buku	1.750 Lembar/ 4 Buku	1.750 Lembar/ 4 Buku	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.750 Lembar/ 4 Buku	1.750 Lembar/ 4 Buku	1.750 Lembar/ 4 Buku	1.750 Lembar/ 4 Buku	740.625	740.625	740.625	740.625	2.962.500	
		13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	14 Laporan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	14 Laporan	1.390.000	1.390.000	1.390.000	8.210.000	12.380.000	
			63 Unit/ 4 Paket			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		63 Unit/ 4 Paket				45.737.300				Kasubag KKA
			58 Unit/ 1 Paket			Pengadaan Mebel		58 Unit/ 1 Paket			-	19.597.400	-	-	19.597.400	
			5 Unit/ 3 Paket			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		5 Unit/ 3 Paket			-	26.139.900	-	-	26.139.900	

		6 Laporan	6 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6 Laporan	6 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	17.093.370	17.093.370	1.588.176	1.588.176	37.363.092	Kasubag KKA
		3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1.588.176	1.588.176	1.588.176	1.588.176	6.352.704	
		3 Laporan	3 Laporan			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 Laporan	3 Laporan			15.505.194	15.505.194	-	-	31.010.388	
		3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	23.335.678	52.875.879	22.535.678	22.535.678	121.282.913	Kasubag KKA
		6 Unit				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6 Unit				22.285.678	22.285.679	22.285.678	22.285.678	89.142.713	
		3 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.050.000	250.000	250.000	250.000	1.800.000	
			1 Unit			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Unit				30.340.200			30.340.200	
Tersedianya Sistem Pelayanan Informasi Publik	Kemudahan Akses Cepat, kurat dan Akuntabel (%)				0,43					0,43						
Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	Tersedianya SOP (%)				2,00					2,00						
Adanya Inovasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik (%)				0,8					0,8						
	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)				2,60					2,60						
Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)				76,61					76,61						
		3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	17.944.225	7.944.225	17.944.225	7.944.225	51.776.900	Kasie. AP3 dan SOSEK
		3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	14.598.200	4.598.200	14.598.200	4.598.200	38.392.800	
					1 Dokumen	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	3.346.025	3.346.025	3.346.025	3.346.025	13.384.100	
		3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	1.703.125	1.703.125	1.703.125	1.703.125	6.812.500	Kasie PEM,SOSEK dan AP3
					1 Laporan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan				1 Laporan	1.703.125	1.703.125	1.703.125	1.703.125	6.812.500	

				1 Laporan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Di Desa				1 Laporan	-	2.450.000	-	-	2.450.000	Kasie. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
				1 Laporan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	-	2.450.000	-	-	2.450.000	
				1 Dokumen	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				1 Dokumen	-	-	-	7.398.500	7.398.500	KASIE. TRANTIB
				1 Dokumen	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	-	-	-	7.398.500	7.398.500	
			14 Dokumen		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			14 Dokumen		4.200.000	-	-	4.200.000	8.400.000	KASI PEM
			7 Dokumen		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			7 Dokumen		2.100.000	-	-	2.100.000	4.200.000	
			7 Dokumen		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			7 Dokumen		2.100.000	-	-	2.100.000	4.200.000	

Maumere, 03 Nopember 2025

CAMAT WAIBLAMA,


FRANSISKUS ISMAEL, SE
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19760915 200212 1 008

REALISASI RENCANA AKSI PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN WAIBLAMA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI TARGET				KEGIATAN	HASIL YANG DICAPAI				REALISASI ANGGARAN				JUMLAH	PENANGGUNG JAWAB
		TW 1	TW2	TW3	TW 4		TW 1	TW2	TW3	TW 4	TW 1	TW2	TW3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)				76,61					76,61						
Tersedianya Sarana dan Prasarana	Indeks Sarana dan Prasarana				74,43					74,43						
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)				78,35					0,00						
		4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1.500.000	800.000	600.000	4.800.000	7.700.000	Kasubag PEP
		4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1.500.000	800.000	600.000	4.800.000	7.700.000	
		3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	283.816.244	283.816.244	283.816.244	283.816.243	1.135.264.975	Kasubag KKA
		4 Bulan	4 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4 Bulan	4 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	274.487.494	274.487.494	274.487.494	274.487.493	1.097.949.975	
		3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	9.328.750	9.328.750	9.328.750	9.328.750	37.315.000	
		3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	4.243.619	4.243.617	4.243.619	5.507.419	18.224.474	Kasubag KKA
		-	-	-	1 Paket	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerrangan Bangunan Kantor	-	-	-	1 Paket	-	-	-	1.213.800	1.200.000	
		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2.224.034	2.224.032	2.224.034	2.224.034	8.896.134	
		1400 Lembar/ 4 Buku	1400 Lembar/ 4 Buku	1400 Lembar/ 4 Buku	1400 Lembar/ 4 Buku	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1400 Lembar/ 4 Buku	1400 Lembar/ 4 Buku	1400 Lembar/ 4 Buku	1400 Lembar/ 4 Buku	719.585	719.585	719.585	719.585	2.878.340	
		13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.350.000	5.250.000	
					63 Unit/ 4 Paket	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				63 Unit/ 4 Paket		#REF!		43.872.499	43.872.499	Kasubag KKA
					58 Unit/ 1 Paket	Pengadaan Mebel				58 Unit/ 1 Paket	-		-	19.522.999	19.522.999	
					5 Unit/ 3 Paket	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5 Unit/ 3 Paket	-		-	24.349.500	24.349.500	

		6 Laporan	6 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6 Laporan	6 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	16.728.742	16.728.742	1.223.548	1.223.549	35.904.581	Kasubag KKA
		3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1.223.548	1.223.548	1.223.548	1.223.549	4.894.193	
		3 Laporan	3 Laporan			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 Laporan	3 Laporan			15.505.194	15.505.194	-	-	31.010.388	
		3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	23.253.489	22.453.489	22.453.489	47.173.489	115.333.956	Kasubag KKA
		6 Unit				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6 Unit				22.203.489	22.203.489	22.203.489	22.203.489	88.813.956	
		3 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.050.000	250.000	250.000	250.000	1.800.000	
					1 Unit	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Unit		1 Unit	-	-	-	24.720.000	24.720.000	
Tersedianya Sistem Pelayanan Informasi Publik	Kemudahan Akses Cepat, kurat dan Akuntabel (%)				0,43					0,43						
Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	Tersedianya SOP (%)				2,00					2,00						
Adanya Inovasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik (%)				0,8					0,8						
	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)				2,60					0,75						
Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)				76,61					76,61						
		3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	17.845.891	7.855.891	17.855.891	7.855.130	51.412.803	Kasie. AP3 dan SOSEK
		3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	14.588.200	4.598.200	14.598.200	4.597.440	38.382.040	
					1 Dokumen	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	3.257.691	3.257.691	3.257.691	3.257.690	13.030.763	
		3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	1.682.980	1.682.980	1.682.980	1.682.980	6.731.920	Kasie PEM,SOSEK dan AP3
					1 Laporan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan				1 Laporan	1.682.980	1.682.980	1.682.980	1.682.980	6.731.920	

				1 Laporan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Di Desa				1 Laporan	-	-	-	2.399.900	2.399.900	Kasie. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
		-		1 Laporan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-	1 Laporan	-	-	-	2.399.900	2.399.900	
				1 Dokumen	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				1 Dokumen	-	-	-	7.299.413	7.299.413	KASIE. TRANTIB
		-		1 Dokumen	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	7.299.413	7.299.413	
		14 Dokumen			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	14 Dokumen					3.150.000	-	3.150.000	6.300.000	KASI PEM
		7 Dokumen			Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7 Dokumen					1.700.000	-	1.700.000	3.400.000	
		7 Dokumen			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	7 Dokumen					1.450.000	-	1.450.000	2.900.000	

Maumere, 31 Desember 2025



CAMAT WAIBLAMA,

FRANSISKUS ISMAEL, SE
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19760915 200212 1 008

**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA UTAMA
KECAMATAN WAIBLAMA TAHUN 2025**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PERHITUNGAN	TARGET	RELISASI	CAPAIAN	PROGRAM	ANGGARAN		CAPAIAN (%)
							PAGU	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Indeks Kepuasan Masyarakat		76,71	76,61	100				
Tersedianya Sarana dan Prasarana	Indeks Sarana dan Prasarana	Jumlah layanan Tersedianya Sarana dan Prasarana yang terlayani dibagi total Jumlah Target layanan Tersedianya Sarana dan Prasarana dikali 100%	74,43	74,43	100	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1.472.561.025	1.356.300.484	92,10
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	Jumlah Nilai SAKIP dibagi Target Nilai SAKIP dikali 100%	78,35	0	0				
Tersedianya sistem Informasi Pelayanan Publik	Kemudahan Akses Cepat, Akurat dan Akuntabel	Jumlah layanan Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Publik yang terlayani dibagi total target jumlah layanan hasil Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Publik dikali 100%	0,43	0,43	100	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	58.589.400	58.144.723	99,24
Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	Tersedianya SOP	Jumlah layanan Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan yang terlayani dibagi total target jumlah layanan hasil Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan dikali 100%	2,00	2,00	100	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2.450.000	2.399.900	97,96
Adanya Inovasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah layanan Adanya Inovasi Pelayanan Publik yang terlayani dibagi total target jumlah layanan hasil Adanya Inovasi Pelayanan Publik dikali 100%	0,8	0,8	100	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	7.398.500	7.299.413	98,66
	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	Jumlah IPP Terhadap Pelayanan Kecamatan dibagi total target jumlah IPP Terhadap Pelayanan Kecamatan dikali 100%	2,60	0,75	0,29	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.400.000	6.300.000	75,00
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)	Jumlah IKM Terhadap Pelayanan Kecamatan dibagi total target jumlah IKM Terhadap Pelayanan Kecamatan dikali 100%	76,71	76,61	100				
			Jumlah Anggaran Tahun 2025				1.549.398.925		
			Realisasi Tahun 2025					1.430.444.520	92,32

Maumere, 31 Desember 2025

CAMAT WAIBLAMA,
FRANSISKUS ISMAEL, SE
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19750915 200212 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
KECAMATAN WAIBLAMA
JALAN NANGHALE - PRUDA KM.16 KODE POS 86183
TANARAWA

KEPUTUSAN CAMAT WAIBLAMA
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KECAMATAN WAIBLAMA
TAHUN 2024-2026

CAMAT WAIBLAMA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KEDUA Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 perlu menetapkan Keputusan Camat Waiblama tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Waiblama Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : (1) Indikator Kinerja Utama Kecamatan Waiblama Tahun 2024-2026, sebagaimana termuat dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Waiblama ini;

(2) Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Keputusan Bupati Nomor 682 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026.

KEDUA : (1) Indikator Kinerja Utama Kecamatan Waiblama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai acuan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

(2) Indikator Kinerja Utama Kecamatan Waiblama merupakan pedoman kinerja yang digunakan untuk:

- menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- menetapkan Perjanjian Kinerja (PK)
- menyusun pohon kinerja;
- menyusun cascading;
- menyusun Rencana Aksi;
- melakukan penyusunan laporan monitoring hasil realisasi rencana aksi pelaksanaan program dan kegiatan;
- menyusun Laporan Kinerja (LKj); dan
- melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

- (3) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan dengan mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Waiblama Tahun 2024-2026;
- (4) Format Keputusan Camat Waiblama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Waiblama ini.

KETIGA : Sekretaris Kecamatan Waiblama berkewajiban melakukan:

- a. monitoring atas penerapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Waiblama ; dan
- b. monitoring dan evaluasi atas capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Waiblama untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.

KEEMPAT : (1) Camat Waiblama melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama;

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Sekretaris Kecamatan Waiblama.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Camat Waiblama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Waiblama.

KEENAM : Keputusan Camat Waiblama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal, 31 Desember 2024

CAMAT WAIBALAMA,


FRANSISKUS ISMAEL, SE
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19750915 200212 1 008

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN CAMAT WAIBLAMA

NOMOR : 15 TAHUN 2024

TANGGAL : 31 Desember 2024

TENTANG :

KEPUTUSAN CAMAT WAIBLAMA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN WAIBLAMA TAHUN 2024-2026.

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN WAIBLAMA

Perangkat Daerah : Kecamatan Waiblama

Visi : -

Misi : -

Tujuan : Terwujudnya Reformasi Birokrasi.

Tugas :

Membantu Bupati dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;

Fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengordinasian penerapan dan penegekan peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
4. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
5. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/ Kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

NO	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ ALASAN/ FORMULA PERHITUNGAN	SATUAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat						
I.	Tersedian ya Sarana dan Prasarana	Indeks Sarana dan Prasarana	Jumlah Nilai skor x bobot <u>dari 7 aspek</u> <u>sarpras x 15</u> 100	Indeks	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Sekretaris Kecamatan	APBD II
					Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kasubag PEP	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kasubag KKA	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	Kasubag KKA	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kasubag KKA	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kasubag KKA	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kasubag KKA	

I.2	Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Publik	Kemudahan akses, cepat, akurat dan akuntabel.	Jumlah nilai skor x bobot dari 3 aspek <u>Informasi Layanan Publik x 15</u> 100	%	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kasie.	APBD II
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kasie. Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik dan Kasie Sosial dan Ekonomi	
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kasie.	APBD II
					Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kasie. Pemberdayaan Masyarakat	
1.3	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	Indikator Tersedianya SOP	Jumlah nilai skor x bobot dari 4 aspek <u>Konsultasi dan Pengaduan x 15</u> 100	%	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kasie.	APBD II
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kasie. Trantib dan Kasie Sosek	
1.4	Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik	Indikator Capaian Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah nilai skor x bobot dari 1 aspek <u>Inovasi Pelayanan Publik x 15</u> 100	%	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Kasie.	APBD II
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Kasie. Pemerintahan	

B. TARGET TAHUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA : KECAMATAN WAIBLAMA TAHUN 2024 - 2026

NO	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI AWAL (2023)	TAHUN			KONDISI AKHIR
					2024	2025	2026	
I.	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	66,92	66,92	67,92	68,92	68,92
I.1	Tersedianya Sarana dan Prasarana	Indeks Sarana dan Prasarana	Indeks	65,87	65,87	74,43	93,61	93,61
I.2	Tersedianya Sistem Pelayanan Informasi Publik	Kemudahan Akses dan cepat	%	0,42	0,42	0,43	0,44	0,44
1.3.	Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan	Tersedianya SOP	%	0,0	1	2	3	3
1.4.	Adanya Inovasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik	%	0,0	0,7	0,8	0,9	0,9

CAMAT WAIBLAMA



FRANSISKUS ISMAEL, SE
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19760915 200212 1 008